**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kegiatan suatu perekonomian selalu mengalami perubahan yang nyata dan dapat dirasakan dengan jelas oleh masyarakat. Ketika perekonomian mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi atau keadaan perekonomian mengalami kemerosotan yang serius akan dapat diketahui oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pengembangan ekonomi. Untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian suatu Negara yaitu dengan cara memperhatikan data mengenai kegiatan suatu perekonomian yang salah satunya adalah data pendapatan nasional.

Pengumpulan data pendapatan nasional terutama bertujuan untuk memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi yang dicapai berbagai Negara. Terdapat beberapa kegunaan dari data pendapatan nasional. Salah satu diantaranya adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan berdasarkan kepada harga yang berlaku dan harga konstan. Peningkatan nilai pendapatan nasional menurut harga konstan dapat memberi gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga konstan. Pendapatan nasional yang dimaksud dapat diartikan sebagai Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto.

1

Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Untuk mengukur maju tidaknya perekonomian daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah yaitu dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai ilustrasi, selama periode 2000 – 2010, perekonomian Kabupaten Bone terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bone Tahun 2000 – 2010 (Juta Rupiah)

|  |  |
| --- | --- |
| TAHUN | PDRB atas Dasar |
| Harga Konstan |
| 2000 | 809.447,07 |
| 2001 | 836.736,92 |
| 2002 | 877.961,43 |
| 2003 | 922.923,54 |
| 2004 | 2.209.958,50 |
| 2005 | 2.305.158,94 |
| 2006 | 2.442.413,22 |
| 2007 | 2.589.298,03 |
| 2008 | 2.776.660,08 |
| 2009 | 2.985.922,41 |
| 2010 | 3.231.085,05 |

Sumber: BPS Kabupaten Bone Tahun 2000 – 2010

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Bone atas dasar harga konstan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2000 PDRB harga konstan sebesar Rp.809.447,07 juta pada tahun 2001 naik menjadi Rp.836.736,92 juta yang berarti terjadi kenaikan senilai Rp.27.289,85 juta atau sebesar 3,37%. Kemudian pada tahun 2002 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.877.961,43 juta, sehingga 2001 – 2002 naik senilai Rp.41.224,51 juta atau sebesar 4,93%. Terutama pada tahun 2003 menuju tahun 2004, kenaikan PDRB sangat drastis yaitu senilai Rp.1.287.034,96 juta atau sebesar 139,45%, dan pada tahun 2003 PDRB Kabupaten Bone dalam harga konstan hanya mencapai Rp. 922.923,54 juta sedangkan pada tahun 2004 naik hingga mencapai Rp. 2.209.958,50 juta. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya, PDRB Kabupaten Bone selalu mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya sumber daya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu sumber daya manusia yang telah diberikan pelatihan yang memadai hingga mampu mengelola daerahnya memperoleh kemajuan, serta letak geografisnya yang sangat mendukung. Struktur perekonomian Kabupaten Bone sangat didominasi oleh sektor pertanian khususnya sektor pertanian tanaman pangan. Hal ini dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan total PDRB setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi di suatu wilayah berjalan selama kurun waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan PDRB dengan cara pengeluaran membedakan perbelanjaan-perbelanjaan yang dilakukan dalam perekonomian kepada 5 komponen, yaitu: pengeluaran konsumsi yang meliputi perbelanjaan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, pengeluaran investasi dan dinamakan pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan dalam stok, ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa. Rumah tangga mengkonsumsi sebagian output perekonomian, perusahaan dan rumah tangga menggunakan sebagian output untuk investasi dan pemerintah membeli sebagian output untuk kepentingan publik. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus terhadap investasi dan pengeluaran pemerintah.

Tambahan investasi yang ditanamkan di berbagai sektor yang menyebabkan ekonomi semakin tumbuh dan berkembang dengan indikatornya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pendapatan yang merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan. Tidak ada yang membantah bahwa meningkatnya investasi swasta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena terjadi perluasan produksi dan permintaan yang berdampak tidak hanya pada bidang ekonomi saja, akan tetapi telah meluas pada bidang-bidang sosial kemasyarakatan. Sehingga pihak pemerintah dan swasta harus berusaha agar investasi yang dilakukan dapat mewujudkan tingkat pengembalian modal yang maksimum.

Dalam mengembangkan stok modal, pemerintah dan swasta memegang peranan yang berbeda. Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan. Namun, pihak swasta akan kurang berminat karena tingkat pengembalian modalnya rendah dan susah memungut pembayaran dari pengguna-penggunanya. Swasta bertanggung jawab mendirikan perusahaan-perusahaan dan industri barang dan jasa yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pada waktu yang sama menghasilkan keuntungan dari mereka.

Teori Schumpeter menyatakan bahwa didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan suatu pembaharuan, seseorang atau perusahaan akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi Negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.

Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah. Rendahnya tingkat tabungan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, sedang rendahnya tingkat pendapatan dapat dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber daya dan modal. Rendahnya produktivitas dapat disebabkan keterbelakangan penduduk dan belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada. Kedua teori tersebut adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang berkembang berdasarkan analisis ekonomi klasik. Proses pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter adalah proses inovasi yang dilaksanakan oleh para inovator dan wirausaha sedangkan menurut Solow mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi.

Investasi swasta terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sehingga sebagai data awal, penulis paparkan data investasi selama periode 2000 – 2010 di Kabupaten Bone pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 Data investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten Bone Tahun

2000 - 2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAHUN | PMA (Rupiah) | PMDN (Rupiah) |
| RENCANA | REALISASI | RENCANA | REALISASI |
| 2000 | 5,000,000,000  | 1,000,000,000  | 28,213,000,000  | 17,426,500,000  |
| 2001 | 5,000,000,000  | 1,000,000,000  | 31,598,000,000  | 17,826,500,000  |
| 2002 | 3,171,251,450,000  | 1,150,000,000  | 32,503,000,000  | 18,576,500,000  |
| 2003 | 3,171,251,450,000 | 2,700,000,000  | 33,453,000,000  | 20,411,500,000  |
| 2004 | 3,171,251,450,000 | 3,350,000,000  | 30,961,000,000  | 20,164,000,000  |
| 2005 | 3,183,751,450,000  | 3,700,000,000  | 25,371,000,000  | 18,179,000,000  |
| 2006 | 20,000,000,000 | 2,150,000,000  | 25,371,000,000 | 23,529,000,000  |
| 2007 | 7,000,000,000 | 1,650,000,000  | 24,171,000,000  | 21,929,000,000  |
| 2008 | 14,000,000,000  | 650,000,000  | 22,571,000,000  | 20,185,000,000  |
| 2009 | 7,000,000,000  | 850,000,000  | 64,421,000,000  | 19,335,000,000  |
| 2010 | 25,000,000,000  | 1,850,000,000  | 63,486,000,000  | 18,435,000,000  |

Sumber: Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM) Tahun 2000 – 2010 (kurs 10.000)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa tingkat realisasi PMA di Kabupaten Bone periode 2000-2010 berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan nilai yang sangat rendah dari perencanaan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh rencana investasi asing banyak yang ditangguhkan karena banyaknya pengusaha PMA meninggalkan Kabupaten Bone dan mengalihkan investasinya ke daerah lain yang dianggap lebih menguntungkan, serta fasilitas infrastruktur yang belum memadai. Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Bone masih relatif rendah disebabkan oleh banyak perusahaan PMA yang masuk di Kabupaten Bone tanpa perizinan yang jelas, sehingga tidak ada laporan yang masuk ke KPPM, dan terdapat pula perusahaan PMA yang belum aktif, bahkan tidak aktif kegiatan produksinya.

Perkembangan rencana dan realisasi investasi PMDN mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan realisasi lebih rendah dibanding pertumbuhan rencana. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa perusahaan yang pada awalnya rencana berinvestasi lebih besar, namun setelah melihat prospek proyek yang hendak dikelolah kedepannya tidak menjanjikan akhirnya investor mengurangi jumlah investasinya. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bone tidak cukup prospektif bagi investor swasta nasional (dalam negeri) maupun investor dari luar negeri (asing). Sebagian besar investasi PMDN bergerak di sektor industri pabrik gula dan jasa angkutan. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bone mengalami kesulitan dalam pengelolaan PMA maupun PMDN nya. Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Teori Harrod-Domar menunjukkan bahwa seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu. Dalam perekonomian dua sektor pertambahan perbelanjaan agregat terutama harus terwujud dari kenaikan investasi. Berarti untuk menjamin pertumbuhan ekonomi, investasi harus terus menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Sekiranya keadaan ini tidak berlaku, seperti halnya di Kabupaten Bone maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi.

Masalah lain yang perlu dijelaskan yakni pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah pengeluaran pembangunan daerah bagi terciptanya pembangunan daerah tersebut. Anggaran pengeluaran pembangunan daerah itu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan pelayanan masyarakat dan perluasan tenaga kerja. Kenyataannya masih banyak penyelewengan-penyelewengan penggunaan dana yang berasal dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah khususnya.

Keuangan daerah merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mengukur kemakmuran suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Satuan wilayah pembangunan Kabupaten Bone sebagai dasar salah satu kawasan otonom mempunyai penerimaan keuangan daerah yang sangat bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat, khususnya dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tinggat kegiatan ekonomi Negara. Sebagai data awal, penulis akan memaparkan data pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode 2000-2010 yang ditunjukkan pada tabel 1.3 :

Tabel 1.3 Data pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

|  |  |
| --- | --- |
|  TAHUN |  PENGELUARAN PEMERINTAH |
| 2000 | 79.008.851.000 |
| 2001 | 120.011.627.000 |
| 2002 | 281.835.022.297,54 |
| 2003 | 327.201.442.282,54 |
| 2004 | 327.202.000.000 |
| 2005 | 393.000.811.585 |
| 2006 | 548.923.764.255,10 |
| 2007 | 708.743.715.071,39 |
| 2008 | 774.248.282.596,50 |
| 2009 | 808.389.682.065,41 |
| 2010 | 774.466.683.951,82 |

Sumber: BAPPEDA dan Statistik Kab. Bone Tahun 2000-2010

Berdasarkan data pada tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada periode tahun 2009-2010 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak melakukan belanja hibah dan belanja bagi hasil kepada propinsi/kab./kota dan pemerintah desa. Belanja hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa. Belanja bagi hasil sebagaimana diatur dalam pasal 37 f Permendagri No. 13 tahun 2006 adalah digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. Sejalan dengan perbaikan ekonomi yang semakin kondusif, sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan rutin. Besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah utama salah satunya berasal dari pajak.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan oleh pertambahan produksi atau pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan adanya penanaman modal atau investasi, karena investasi merupakan kebutuhan dalam pembangunan yang menghendaki adanya pertumbuhan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam tesis yang mengambil judul “Pengaruh PMA, PMDN dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bone”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone?
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone?
6. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari investasi swasta dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah Kabupaten Bone dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang. Dan diharapkan dapat membawa nilai tambah khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pertumbuhan Ekonomi**
2. **Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Penekanan pertumbuhan itu pada perubahan atau perkembangan itu sendiri dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, yang diperhatikan adalah sisi output totalnya (GDP/PDB) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan PDB total dan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2005:45).

13

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Menurut Arsyad (1999:34) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan, sebab tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatam kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Jika input dan produktivitas adalah tetap, maka produksi yang dihasilkan yang dinyatakan dengan output barang dan jasa juga akan konstan. Artinya, bahwa dalam perekonomian tersebut tidak terjadi pertumbuhan ekonomi.

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya alam, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua ini merupakan faktor ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budi, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan merupakan faktor non-ekonomi (Jhingan, 1995).

Para ahli ekonomi menganggap faktor ekonomi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor yang dipandang sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, serta luas pasar (Sukirno, 2005).

1. Tanah Dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, serta jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang dimiliki. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan baru dimulai dan terdapat hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi diluar sektor primer (pertanian dan pertambangan), maka dapat diatasi bila kekayaan alam yang ada dapat diusahakan untuk memperoleh keuntungan. Kemungkinan untuk memperoleh keuntungan tersebut sangat menarik pengusaha-pengusaha dari negara lain untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Namun perkembangan ekonomi tidak selalu bergantung pada kekayaan alam suatu negara.

1. Jumlah Dan Mutu Dari Penduduk Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Sebagai akibat dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, kemahiran penduduk akan selalu bertambah tinggi. Maka produktivitas akan bertambah dan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Pengusaha adalah bagian dari penduduk, apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk berjumlah banyak, lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan. Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat perluasan pasar. Apabila didalam perekonomian sudah berlaku keadaan pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi yang lebih cepat dari pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan menurun.

1. Barang-Barang Modal Dan Tingkat Teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Apabila barang-barang modal bertambah sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang dicapai akan jauh lebih rendah dari yang dicapai masa kini. Kemajuan teknologi menimbulkan akibat positif dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi efisiensi produksi suatu barang sehingga menurunkan biaya produksi suatu barang. Selain itu kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya.

1. Sistem Sosial Dan Sikap Masyarakat

Mengenai masalah pembangunan di negara berkembang, ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi hal penting dalam pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern yang produktivitasnya tinggi. Sikap masyarakat juga menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi. antara lain sikap berhemat untuk mengumpulkan uang berinvestasi dan sikap selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.

1. Luas Pasar Sebagai Sumber Pertumbuhan

Adam Smith menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas tidak terdapat dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Para pengusaha lebih suka menggunakan cara memproduksi yang teknologinya rendah. Karena produktivitasnya yang rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi luas pasar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, suatu Negara melakukan pembangunan di segala bidang yang dikenal dengan teori pembangunan seimbang.

1. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk domestik suatu wilayah merupakan nilai seluruh produksi dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut atau tidak. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik atau regional adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis region tersebut.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian faktor produksi dari kegiatan produksi di suatu wilayah berasal dari wilayah lain. Demikian juga sebaliknya, faktor produksi yang dimiliki wilayah tersebut ikut pula dalam proses produksi di wilayah lain. Hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul di suatu wilayah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan (pada umumnya berupa gaji/upah, sewa tanah, bunga netto, dan keuntungan) yang mengalir antarwilayah (termasuk dari/ke luar negeri), maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dengan Produk Regional. Produk Regional adalah produk domestik ditambah pendapatan dari luar wilayah dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar wilayah tersebut. Dengan kata lain, Produk Regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah, PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi diseluruh wilayah. Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat bergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki. Struktur ekonomi dapat memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Menurut Taringan (2009:24) untuk menghitung PDRB yang ditimbulkan dari suatu daerah ada empat pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai tambah di suatu wilayah dengan melihat seluruh produksi netto barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian selama satu tahun. Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

1. Pendekatan Pendapatan

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, meliputi:

1. Upah/Gaji (balas jasa faktor produksi tenaga kerja)
2. Sewa Tanah (balas jasa faktor produksi tanah)
3. Bunga Netto (balas jasa faktor produksi modal)
4. Keuntungan (balas jasa faktor wiraswasta/*skill*)

PDRB merupakan jumlah balas yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu region/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dalam defenisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto dari seluruh sektor (lapangan usaha).

Dalam perhitungan ini, pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Pendekatan dengan cara ini dapat dilakukan secara langsung menjumlahkan pendapatan, yaitu jumlah balas jasa faktor produksi upah/gaji, bunga netto, sewa tanah dan keuangan, sehingga diperoleh Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor. Untuk memperoleh PDRB atas dasar harga pasar, harus ditambah dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto. Perhitungan dengan pendekatan pendapatan (*income approach*) ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang sulit dihitung dengan pendekatan produksi, seperti sektor pemerintah dan jasa yang usahanya tidak mencari untung (non profit).

1. Pendekatan Pengeluaran

Yaitu model pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai permintaan akhir dari seluruh barang dan jasa, yaitu:

1. Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dan pemerintah.
2. Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap bruto.
3. Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor netto. Ekspor yang dimaksud adalah jumlah nilai ekspor dikurangi dengan jumlah nilai impor.

Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor). Pendekatan dengan cara ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi akan digunakan untuk keperluan konsumsi, pembentukan modal (investasi) dan ekspor.

1. Metode Alokasi

Model pendekatan ini digunakan karena kadang-kadang dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan perhitungan pendapatan regional dengan menggunakan metode langsung seperti tiga cara diatas, sehingga dipakai metode alokasi atau metode tidak langsung. Hal ini dapat terjadi misalnya suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat berada di wilayah lain, sedang kantor cabang berada di wilayah tersebut. Seringkali kantor cabang ini tidak bisa membuat neraca untung rugi, sebab neracanya dibuat di kantor pusat, hingga tidak dapat diketahui berapa keuntungan yang diperoleh dari kantor cabang ini. Padahal keuntungan adalah salah satu komponen dari nilai tambah karena keuntungan tidak diketahui, maka nilai tambahnya tidak dapat dihitung. Untuk dapat menghitung hal-hal yang demikian maka digunakan alokasi, yaitu dengan jalan mengalokasikan angka-angka secara terpusat dengan memakai indikator-indikator yang sekiranya dapat menunjukan peranan cabang yang berada di daerah itu terhadap kantor pusatnya. Indikator itu dapat berupa volume kerja, jumlah karyawan, jumlah penduduk dan lain-lain.

Metode alokasi ini merupakan metode pendekatan tidak langsung, sedang yang lain merupakan metode langsung. Dengan menggunakan metode langsung akan dapat dihasilkan angka-angka yang dapat menggambarkan karakteristik yang lebih mendekati kenyataan bila dibandingkan dengan angka-angka yang diperoleh dari metode yang tidak langsung. Oleh karena itu sejauh mungkin digunakan metode langsung, dan bila hal ini tidak mungkin, baru ditempuh penghitungan dengan metode tidak langsung ini.

Adapun cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut

1. PDRB atas dasar harga konstan

Yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Serta mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/antar Provinsi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Secara konseptual, nilai atas dasar harga konstan juga mencerminkan kuantum produksi tahun berjalan yang dinilai dengan harga tahun dasar. Dan secara metodologis nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan tiga metode dasar untuk menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Revaluasi. Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga dasar. Cara ini diperoleh dengan menilai produksi pada tahun yang bersangkutan dengan memakai harga pada tahun dasar (tahun 2000). Begitu biaya-biaya antara dinilai dengan memakai harga pada tahun dasar pula. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen biaya antara yang sangat banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun dasar.
2. Ekstrapolasi. Yang perlu diperhatikan dalam cara ini adalah metode ekstrapolatornya. Kualitas produksi masing-masing sektor/sub sektor merupakan eksplorator yang terbaik. Namun apabila angka-angka tersebut sukar diperoleh dapat pula dipakai keterangan-keterangan lain yang erat kaitannya dengan produktifitas seperti tenaga kerja, kapasitas produksi (mesin, kendaraan, dan sebagainya). Nilai tambah atas dasar harga konstan yang dihitung dengan ekstrapolasi diperoleh dengan mengalihkan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi (kuantum). Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.
3. Deflasi. Metode ini dilakukan dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan indeks harga dari barang-barang yang bersangkutan. Indeks harga disini dapat berupa indeks harga perdagangan besar, produsen dan harga eceran, dan sebelumnya indeks harga sebagai tahun dasar harus disesuaikan dengan tahun dasarnya.

Perkembangan teknologi dan perekonomian merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan telah mengakibatkan perubahan struktur secara terus menerus. Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku Sistem Neraca Nasional dinyatakan bahwa estimasi PDB/PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 atau 5. Hal ini dimaksudkan agar besaran angka-angka PDB/PDRB dapat saling diperbandingkan antar Negara, Provinsi/wilayah dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian nasional atau wilayah. Tahun dasar yang dianggap representative untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah tahun 2000 karena tahun tersebut dianggap sebagai tahun yang relatif stabil setelah krisis ekonomi 1997/1998. Dengan dukungan data yang lebih lengkap dan rinci serta berkesinambungan, diharapkan estimasi PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.

1. PDRB atas dasar harga berlaku

Yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/Provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula. Serta menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/Provinsi. Selain itu, menunjukkan peranan kelembagaan yang menggunakan barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Selanjutnya, dalam penyusunan PDRB akan diperoleh manfaat, seperti:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor.
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah.
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan harga (inflasi/deflasi).
4. Sebagai suatu indikator mengenai tingkat kemakmuran.

Menurut Widodo (2006:78) bahwa PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu waktu tertentu sebagai harga dasar.

Sehingga diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu daerah atau wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB juga merupakan ukuran laju pertumbuhan suatu daerah. PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian.
3. Industri pengolahan.
4. Listrik, gas dan air bersih.
5. Konstruksi.
6. Perdagangan, hotel dan restoran.
7. Pengangkutan dan komunikasi.
8. Keuangan, penyewaan dan jasa-jasa perusahaan.
9. Jasa-jasa lain termasuk pelayanan pemerintah.

Pertumbuhan riil dari agregat ekonomi diturunkan dengan cara menghilangkan pengaruh dari perubahan harga pada angka atas dasar harga berlaku, sehingga terbentuklah angka atas dasar harga konstan. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto, nilai tambah sektoral, komponen penggunaan PDRB.

1. **Investasi**
2. **Pengertian Investasi**

Investasi merupakan tindakan atau pilihan bagi seseorang yang mengalokasikan sejumlah uang mengharapkan *return*, yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Sukirno (2005:366) mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi suatu perekonomian.

Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, yang terdiri dari investasi finansial dan investasi non finansial. Investasi juga didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau pembanjaan penanaman modal. Perusahaan membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi adalah pengeluaran oleh produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk tujuan investasi, yaitu untuk penumpukan stok di gudang atau perluasan pabrik-pabrik (Boediono, 1992). Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal, yang terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi.

Nicholson (1998:690-723) menyampaikan, bahwa modal (*capital*) memberikan peranan penting sebagai faktor produksi dalam proses pertumbuhan. Peningkatan jumlah peralatan modal yang dimiliki yang mengarah pada akumulasi modal, perusahaan-perusahaan berkeinginan untuk mengubah persediaan modal yang mereka miliki dengan melakukan investasi. Persediaan modal yang dimaksud disini adalah jumlah total semua mesin, gedung, dan sumber daya non-tenaga kerja lainnya yang ada di saat tertentu. Aset ini mewakili sebagian dari keluaran perekonomian di masa sebelumnya yang tidak dikonsumsi, kemudian disisihkan untuk dipergunakan sebagai faktor produksi di masa mendatang. Lebih lanjut disampaikan bahwa modal tersebut dipergunakan untuk melakukan investasi dalam mencari keuntungan (*rate of return*) dalam periode tertentu. Dengan demikian besarnya konsumsi yang ditunda yang dipergunakan sebagai investasi sangat tergantung dari banyaknya keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang.

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat investasi, yaitu:

1. Tingkat suku bunga;
2. Ramalan tingkat pengembalian dan penawaran barang di masa mendatang;
3. Permintaan akan modal (*demand for capital*);
4. Kemajuan teknologi.

Adapun para pelaku investasi adalah pemerintah, swasta, dan kerjasama pemerintah swasta. Investasi pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya swasta tidak tertarik pada investasi ini, karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak memberikan keuntungan secara langsung, melainkan berangsur-angsur dalam waktu yang lama. Pihak swasta lebih tertarik pada jenis investasi yang ditujukan untuk memperoleh laba, yang biasanya terdorong oleh karena adanya pertambahan pendapatan.

Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yakni:

1. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut.
2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*profit actual*).
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.
5. **Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Investasi**

Pendapatan nasional dapat naik atau turun karena perubahan investasi. Kondisi ini tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya. Upaya untuk menarik investasi dihadapkan pada dua lingkungan strategi yaitu lingkungan eksternal yang semakin ketat dan daya tarik domestik yang masih lemah. Tantangan eksternal untuk menarik investasi di tahun-tahun mendatang diperkirakan makin berat. Pertama, terdapat kecendrungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun. Beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan tersebut antara lain adalah meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses *merger* dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara. Kedua, dari arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara-negara tertentu.

Sementara itu, lingkungan domestik masih belum mampu menciptakan iklim investasi yang sehat. Beberapa faktor yang menghambat iklim investasi belum mengalami perbaikan yang berarti. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Prosedur yang panjang dan berbelit.
2. Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah di bidang investasi serta kebijakan sektor.
3. Kurangnya kepastian hukum dengan berlarutnya perumusan RUU penanaman modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan pengadilan niaga.
4. Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja.
5. Kegiatan investasi masih sangat sensitif terhadap gangguan keamanan di daerah sehingga penanaman modal cenderung menghindar dari daerah-daerah rawan konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua.
6. Kurangnya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan dalam menarik penanaman modal di Indonesia.

Faktor-faktor utama yang menentukan investasi adalah:

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang kelihatannya mempunyai prospek yang baik dan dapat dilaksanakan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan.

1. Tingkat bunga

Tingkat bunga akan menentukan jenis-jenis informasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan menanam modal apabila tingkat pengembalian modal dari penanaman modalnya itu, yaitu persentase keuntungan netto (tetapi sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar) modal yang diperoleh, lebih besar dari tingkat bunga.

1. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan

Dalam membuat ramalan mengenai keadaan masa depan pada hakekatnya para pengusaha harus bertanya: apakah keadaan masa depan menunjukan keuntungan yang cukup besar yang akan diperoleh dari pengembangan kegiatan ekonomi yang sedang dibuat atau direncanakan. Ramalan yang menunjukan bahwa keadaan perekonomian akan menjadi lebih baik lagi pada masa depan yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan cepat, merupakan keadaan yang akan berkembang cepat, merupakan keadaan yang akan mendorong pertumbuhan investasi.

1. Kemajuan teknologi

Kegiatan para pengusaha untuk menggunakan teknologi yang baru dikembangkan dalam kegiatan produksi atau manajemen dinamakan pembaharuan atau inovasi. Pada umumnya makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuan, para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru, dan adakalanya juga harus mendirikan bangunan-bangunan pabrik/industri yang baru. Maka makin banyak pembaharuan yang akan dilakukan, makin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai.

1. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Dalam kebanyakan analisis mengenai penentuan pendapataan nasional pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan pengusaha adalah berbentuk investasi otonomi. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan perkataan lain, apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula.

1. **Jenis–Jenis Investasi**

Secara umum di dalam pembangunan ekonomi terdapat 4 jenis investasi, yaitu:

1. Investasi yang terdorong (*Induced Investment*) dan investasi otonom (*Autonomous Investment*)
2. Investasi yang terdorong yakni investasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan pusat atau nasional.
3. Investasi otonom yakni investasi yang dilakukan oleh pemerintah karena disamping biayanya sangat besar juga tidak memberikan keuntungan, karena besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, baik itu pendapatan pusat atau nasional tetapi dapat berubah karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor diluar pendapatan seperti tingkat teknologi, kebijaksanaan pemerintah, harapan para pengusaha, dan sebagainya. Investasi ini dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif.
4. *Publik Investment* dan *Private Investment*

*Publik Investment* adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan pemerintah. Yang dimaksud pemerintah disini adalah baik pemerintah pusat atau daerah dan sifatnya resmi. Sedangakan *Private Investment* adalan investasi yang dilakukan oleh swasta dan keuntungan yang menjadi prioritas utama berbeda dengan *Publik investment* yang diarahkan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Investasi Swasta terdiri atas:

1. *Inventory Investment,* termasuk didalamnya semua perubahan dalam persedian bahan baku (*raw materials*), perlengkapan, dan produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan.
2. *Fixed Investment,* termasuk didalamnya semua produk yang dibeli oleh perusahaan yang ditujukan untuk dijual kembali, terdiri dari *residential* dan *nonresidential investment.*

Sedangakan investasi swasta dalam kaitannya dengan penelitian ini merupakan gabungan antara investasi swasta asing (Penanaman Modal Asing/PMA) dengan investasi swasta domestik (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN). Peran pokok dari investasi swasta adalah menambah stok modal dari aset-aset produktif yang dipegang oleh sektor swasta. Dua motivasi utama adalah menggantikan stok modal yang telah ada dan menciptakan stok modal tambahan yang mengandung teknologi baru (perlu dicatat dalam hal ini bahwa “baru” tidak berarti yang termodern/terakhir, tetapi baru bagi perusahaan yang ditanamkan modal).

1. *Domestic Investment* dan *Foreign Investment*

*Domestic Investment* adalah penanaman modal dalam negeri sedangkan *Foreign Investment* adalah penanaman modal asing. Sebuah negara yang memiliki banyak sekali faktor-faktor produksi alam namun tidak memiliki faktor produksi modal (*capital*) yang cukup untuk mengolah sumber-sumber yang dimilikinya itu akan mengundang modal asing, supaya sumber-sumber yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri /PMDN (*Domestik investment*)

Penanaman modal dalam negeri terbagi atas penanaman modal dalam negeri swasta dan penanaman modal dalam negeri pemeritah. Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri swasta adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha swasta domestik. Penanaman modal dalam negeri pemerintah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan atas BUMN atau penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan swasta, atas nama lembaga pemerintah.

1. Penanaman Modal Asing/PMA (*Foreign Investment*)

Penanaman modal asing terdiri dari penanaman modal asing swasta, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta (bukan pemerintah) di negara selain negara asal pemilik modal serta penanaman mosal asing pemerintah/nasional yaitu penanaman modal dari suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal.

1. *Gross Investment* dan *Net Investment*

*Gross Investment* adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu. Jadi mencakup segala jenis investasi, baik itu *Autonomous Investment* maupun *Induced Investment*, baik *private* maupun *publik*, pendek kata seluruh investasi yang dilakukan di suatu negara (daerah) pada atau selama suatu waktu tertentu dinamakan *Gross Investment*. *Net Investment* (investasi netto) adalah selisih dari investasi bruto dan penyesuaian.

1. **Penanaman Modal Asing (PMA)**

Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Penanaman modal asing adalah penanaman modal yang sebagian atau seluruh sumber dana pembangunan proyek-proyek berasal dari kekayaan negara asing, yang bukan merupakan bagian devisa negara Indonesia. Modal asing berupa alat pembayaran luar negeri, alat-alat perusahaan, penemuan baru milik asing, bahan-bahan yang masuk ke Indonesia.

Sedangkan pengertian modal asing antara lain:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan No. 11 tahun 1970 diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. ([www.theceli.com/dokumen/produk/1967/1-1976.htm](http://www.theceli.com/dokumen/produk/1967/1-1976.htm))

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*Direct Investment*) maupun investasi tidak langsung (*Portofolio*) (Suyatno, 2003). Penanaman Modal Asing (PMA) dapat berupa penanaman modal langsung atau portofolio. Investasi langsung biasanya melibatkan kontrol manajemen dari pihak asing sedangkan investasi portofolio meliputi pembelian surat-surat berharga dan jenis investasi ini tidak melibatkan pengawasan pihak asing terhadap perusahaan domestik.

1. Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*), dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak produksi komersial, sebagian saham asing harus dijual kepada warga negara dan atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau pasar modal.
2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*), adalah usaha patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5% dari modal disetor sejak pendirian penanaman modal asing. Ketentuan usaha patungan ini bersifat wajib bagi kegiatan investasi yang dilakukan dalam Sembilan sektor publik, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan mass media. ([www.theceli.com/dokumen/produk/1967/1-1967.htm](http://www.theceli.com/dokumen/produk/1967/1-1967.htm))

Pemerintah sangat memberi perhatian pada PMA karena aliran investasi masuk dan keluar dari negara mereka dapat berakibat yang signifikan. Para ekonom menganggap PMA sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF, total investasi dalam ekonomi Negara tuan rumah) dan saldo pembayaran. Mereka juga berpendapat bahwa PMA mendorong pembangunan bagi negara tuan atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu. PMA menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, dan keterampilan manajemen yang baru. Lebih lanjut, PMA juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produksi yang lebih murah dan akses pada teknologi produk, keterampilan dan pendanaan yang baru.

Keuntungan dari PMA untuk Negara berkembang dapat dihasilkan dari tingkat upah riil yang lebih besar untuk tenaga kerja domestik dan atau kesempatan kerja yang lebih luas, pilihan yang lebih banyak dari kualitas produk yang baik dengan tingkat harga yang lebih rendah untuk konsumen domestik, meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak terhadap investasi asing tersebut, dan keuntungan-keuntungan tidak langsung atau eksternalitas ekonomi dari peningkatan teknologi, pelatihan tenaga kerja lokal, dan mendorong perusahaan-perusahaan domestik melalui keterkaitan ke depan maupun ke belakang. Penanaman Modal Asing (PMA) juga dapat mengakibatkan kerugian atau biaya bagi Negara resipien/penerima, seperti: berbagai konsensus khusus yang diberikan kepada investor asing, misal pengurangan pajak, pengaruh negatif terhadap tabungan domestik, kesulitan-kesulitan neraca pembayaran dan campur tangan asing urusan dalam negeri Negara penerima.

1. **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 1968 dan Undang-Undang No.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu defenisi modal negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut

1. Undang-Undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan “Penanaman Modal Dalam Negeri” ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda, baik yang dimiliki swasta ataupun warga asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan guna menjalankan suatu usaha jangka panjang. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktunya minimal 1 tahun. Penanaman modal dalam negeri memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di Negara-negara sedang berkembang hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Modal investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal. selain itu tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di Negara keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain. Selain itu, juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi Negara berkembang.

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri Langsung (*Domestik Direct Investment, DDI*), yakni penanaman modal oleh pemiliknya sendiri.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri Tidak Langsung (*Domestik Indirect Investment*, DII), yakni melalui pembelian obilgasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan Negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.
3. **Pengeluaran Pemerintah**
4. **Pengertian pengeluaran pemerintah**

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesejahteraan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Sukirno (2005:65) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat *exhaustive expenditure* yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat menghasilkan barang lain lagi. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk sosial. Jadi *exhaustive expenditure* mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, seperti jasa-jasa guru, militer, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya (Suparman, 2003:44). Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang dibiayai. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Prosporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran (G = T). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan (G < T). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan (G > T). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya (Mangkoesoebroto, 2001).

Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan optimalisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini APBD secara efisien dan efektif, maka struktur APBD untuk tahun 2003 terjadi perubahan yakni disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja atau output dan bukan lagi pada input seperti kecenderungan sebelumnya.

Dalam struktur APBD yang baru, sisa lebih APBD tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah. Namun dimasukkan sebagai pembiayaan daerah, sedangkan anggaran belanja rutin dan pembangunan yang pada struktur APBD sebelumnya diarahkan menjadi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal yang diklasifikasikan dalam belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan struktur yang baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran untuk menutupinya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan.

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat dengan penyediaan saran dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan Negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebagian besar dari pajak. Pengeluaran pemerintah yang terdiri pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, yaitu G; yang merupakan bagian dari permintaan agregat ekonomi tiga sektor, C + I + G; dan pengeluaran transfer, yaitu Tr yang berupa pajak negatif kepada masyarakat. Karena ini melalui manipulasi penerimaan pemerintah (pajak) atau pengeluaran pemerintah (G dan Tr); pemerintah dapat ikut mempengaruhi atau mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional.

Pengeluaran pemerintah terdiri atas :

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset Negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesoebroto, 2001).

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme system pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yan ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan Negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dalam negeri dan luar negeri yaitu pada saat implikasi disaat pengembalian.

Dalam kasus pinjaman dalam negeri, pembayaran bunga utang oleh pemerintah akan kembali dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena terjadi transfer pendapatan oleh kelompok masyarakat yang membayar pajak kepada kelompok masyarakat yang menjadi kreditur. Dampak dalam aliran ini masih berputar di dalam negeri karena masing-masing pihak adalah warga Negara Indonesia. Sedangkan dalam kasus pinjaman luar negeri, terjadi aliran dampak ekonomi (*multiplier effect*) yang berbeda. Pihak-pihak yang menerima pengembalian pinjaman adalah pihak kreditur di luar negeri (Mangkroesoeboto, 1998).

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Pengeluaran rutin terdiri atas:

1. Pengeluaran untuk belanja pengawai
2. Pengeluaran untuk belanja barang
3. Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
4. Pengeluaran untuk membayar harga dan cicilan utang
5. Pengeluaran lain-lain adalah pengeluaran untuk membiayai kegiatan rutin yang bersifat nondeparmental seperti biaya surat menyurat, giro pos, belanja porto, biaya pemilu, dan pengeluran lain yang berupa pengeluran transfer seperti subsidi pangan dan subsidi bahan bakar minyak.
6. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut formulasi distribusi dan alokasi dari penentuan besarnya pengeluaran memegang peranan penting dalam pencapaian target kebijaksanaan fiskal. Disamping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap ditempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang sehat melalui upaya mengurangi secara bertahap peran pembiayaan yang bersumber dari luar negeri tanpa mengurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Pengeluaran pembangunan dibagi dalam:

1. Pengeluaran untuk pembiayaan departemen/lembaga
2. Pengeluaran untuk pembiayaan bagi daerah
3. Pengeluaran untuk pembiayaan lain-lain
4. Pengeluaran untuk bantuan proyek

Dengan berbagai perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja Negara yang baru, maka belanja Negara menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) terdiri atas:

1. Belanja pengawai,
2. Belanja barang,
3. Belanja modal,
4. Pembayaran bunga utang,
5. Subsidi,
6. Hibah,
7. Bantuan sosial, dan
8. Belanja lain-lain

Sedangkan belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri atas:

1. Dana perimbangan, dan
2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian

Dengan adanya perubahan format dan struktur belanja Negara menurut jenis belanja maka secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (*unified budget*).

1. **Fungsi utama pengeluaran pemerintah**

Suparman (2003:67) menjelaskan pengeluaran pemerintah yang didistribusikan dengan daya beli di tengah masyarakat disebut dengan pembayaran transfer pemerintah. Pembayaran transfer ini membuat sumber-sumber pendapatan menyokong pada penerimaan yang diterima kemudian. Defisit anggaran dapat mempengaruhi alokasi sumber daya (dengan mempengaruhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah) dan seluruh ukuran sektor pemerintah dalam perekonomian. Defisit juga dapat mempengaruhi harga dan tingkat bunga, dengan demikian mempengaruhi distribusi pendapatan.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa dalam perekonomian modern fungsi pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Fungsi alokasi, yaitu sumber-sumber dana yang diperoleh pemerintah hendaknya dialokasikan untuk barang-barang kebutuhan perorangan dan sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat umum.
2. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang menyeimbangkan dan menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
3. Fungsi stabilisasi, yaitu penggunaan anggaran yang merupakan kebijakan mempertahankan kesempatan kerja, stabilitas peningkatan harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mantap.
4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan terdiri atas:
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
3. Bagian dana perimbangan, yaitu meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
5. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah
6. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah merupakan sumber yang secara terus-menerus ditingkatkan dan konstribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan senantiasa mengacu pada Tripologi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, stabilitas), pemerintah mengambil beberapa kebijakan penting yang tertuang dalam rencana program anggaran, terutama yang terkait langsung dengan bidang keuangan pemerintah atau lebih dikenal dengan APBN.

Sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memiliki sejumlah rencana yang matang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Anggaran keuangan bagi daerah adalah merupakan hal yang sangat substansial dan menjadi penentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di daerah. Alokasi anggaran pemerintah yang lebih dikenal sebagai anggaran keuangan daerah menyangkut tentang alokasi penerimaan dan pengeluaran yang merupakan rencana dan gambaran kegiatan serta dinyatakan dalam bentuk angka-angka untuk jangka waktu tertentu atau dapat disebut budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. **Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Boediono (1992:1) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *outpu*t per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada arti proses disini, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama misalnya 10, 20, atau 50 tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecendrungan yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut artinya harus berasal dari kekuatan yang ada dalam perekonomian itu sendiri.

Sedangkan menurut Todaro (2004:140) ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia,
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja,
3. Kemajuan teknologi

Kemudian Sukirno (2005:19) menyatakan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Dengan perkataan lain, perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya.

Investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dipengaruhi oleh fungsi dari pendapatan, apabila pendapatan meningkat maka akan menciptakan harapan keuntungan yang optimis dan pembiayaan investasi baru akan memberikan keuntungan yang besar. Dengan demikian meningkatnya tingkat pendapatan akan mengakibatkan peningkatan jumlah proyek investasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendapatan pada tahun sebelumnya.

Pada setiap moment, persediaan modal adalah *output* perekonomian yang penting, karena persediaan modal dapat berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu dapat mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal yaitu investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. (Mankiw, 2006:186).

Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut:

1. Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
2. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
3. Rendahnya investasi netto

Akibat keterbatasan tersebut, Negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa modal pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari Teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 1999).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
2. Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol).
4. Kecendrungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save=MPS*) besarnya tetap, demikian juga *ratio* antara modal dan *output* (*Capital Output Ratio=COR*) dan ratio penambahan modal output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Teori ini memiliki kelemahan yakni kecendrungan menabung dan ratio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam teori ekonomi pembangunan (Teori Harold-Domar) diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang dapat ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi, semakin besar investasi suatu Negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu Negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik dibidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecendrungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) adalah modal atau sumber daya manusia, sarana prasarana infrastuktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi karena sumber daya manusia diakumulasikannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik, diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya Produk Domesti Regional Bruto (PDRB).

1. **Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (pusat – Provinsi – daerah).

Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan;
2. Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan;
3. Fungsi pembangunan; keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana;
4. Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif;
5. Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dana tata guna tanah regional (daerah).

Pada saat ini peran pemerintah daerah semakin menonjol. Kita dapat melihat fenomena ini dengan dibentuknya badan-badan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, hubungan-hubungan atau kerja sama ekonomi antar daerah dibentuknya berbagai proyek yang langsung atau tidak langsung diusahakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besarnya jumlah pengeluaran Negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan agregat *demand* akan mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi. Ada beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh karena pengeluaran Negara seperti:

1. **Sektor produksi**

Pengeluaran Negara/daerah, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran pemerintah juga dapat dikatakan sebagai penunjang faktor-faktor produksi lainnya yang berupa alam, modal, tenaga kerja dan manajemen karena pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi tersebut. Pengeluaran pemerintah untuk fasilitas bidang keuangan akan mendorong kemudahan untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa juga berpengaruh terhadap kontinuitas produksi para produsen.

1. **Distribusi**

Pengeluaran Negara/daerah, secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Misal, hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan, paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang sehingga akan menjadi tenaga yang berpenghasilan relatif baik dan berdaya beli baik. Demikian pula subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu. Pemerintah dapat memperoleh pola distribusi pendapatan riil melalui penyediaan keuntungan-keuntungan disuatu pihak, yang hasil akhirnya adalah satu pola pendapatan berbeda bila tidak ada ikut camput tangan dari pemerintah.

1. **Konsumen masyarakat**

Pengeluaran Negara dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun mekanisme pasar. Misal, penambahan penyediaan barang, yang bersifat kolektif maupun barang-barang lain yang harganya disubsidi oleh pemerintah.

1. **Keseimbangan perekonomian**

Dari sisi efektif alokasi anggaran dan efisiensi, pemerintah mengalokasikan kembali sumber-sumber ekonomi dari berbagai barang/jasa yang mengandung keuntungan eksternal. Kegiatan pemindahan ini mengubah alokasi dari sumber-sumber ekonomi karena masing-masing para pembeli dan penerima mempunyai pola pengeluaran yang berlainan. Pajak-pajak yang dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan realokasi dari sumber-sumber ekonomi. Pemerintah dapat mempengaruhi efisiensi dalam perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi regional juga tidak dapat lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah, semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

1. **Penelitian Terdahulu**

Studi mengenai pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (*growth*). Hal ini dapat dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan Negara sedang berkembang adalah terjadinya kekurangan modal. Dengan menggunakan angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai bahan penelitian, analisis pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan. Secara ringkas disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini:

1. Deddy Rustiono, SE (2008) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”. Dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan investasi, tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen. Menggunakan analisis regresi “*Ordinary Least Square*” (OLS) dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.5. penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif signifikan terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Dan Tenaga Kerja lebih berpengaruh terhadap PDRB dibanding variabel yang lainnya.
2. Sri Suneki (2006) dalam penelitiannya tentang “Determinan Perilaku Investasi Swasta di Provinsi Jawa Tengah”. Dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angkatan kerja, tingkat suku bunga dan infrastruktur sebagai variabel dependen. Sedangkan sebagai variabel indenpenden adalah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Metode analisis yang digunakan adalah model dinamis regresi linier berganda dengan lag model. Adapun hasil yang diperoleh bahwa Produk Domestri Regional Bruto (PDRB), angkatan kerja dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Tengah dalam jangka pendek maupun jangka panjang (lag I). Adapun tingkat suku bunga berpengaruh dengan arah negatif dan ada perubahan relatif secara bersama-sama variabel tersebut mampu menjelaskan 84,07 persen variasi variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), angkatan kerja, dan infrastruktur yang berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (lag. I). Adapun tingkat suku bunga internasional (LIBOR) berpengaruh dengan arah negatif secara bersama-sama variabel tersebut mampu menjelaskan 61,07 persen variasi variabel PMA. Dari keempat variabel yang diteliti dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), variabel angkatan kerja merupakan variabel yang berpengaruh dominan, oleh karena itu diperlukan langkah dan strategi untuk menarik minat investasi di Jawa Tengah dengan cara meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan, kecakapan dan keterampilan yang memadai.

1. Fenny Pratiwi ( 2009) dengan judul penelitian “Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi yang Disalurkan Bank Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”. Dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan kredit investasi sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan metode Granger Causality Test untuk melihat arah hubungan antara kredit investasi (Cr) dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hasil uji akar-akar unit memperlihatkan bahwa data kredit investasi dan pertumbuhan ekonomi stasioner pada derajat pertama. Sedangkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kredit investasi dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
2. Saldi Syaputra (2004) yang meneliti dengan judul “Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan”. Dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya yakni pengeluaran pembangunan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Metode penelitian yang dilakukan adalah regresi berganda sehingga memperolah hasil bahwa pengeluaran pembangunan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, namun mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Novita Linda Sitompul (2007) yang mengangkat judul “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara”. Yang merupakan variabel dependen adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sedangkan variabel independennya adalah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah OLS (*Ordinary Lesat Square*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara dipengaruhi oleh tiga sektor yang utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga sektor tersebut memberikan konstribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun sebelumnya, Penanaman Modal Asing (PMA) tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja, dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
4. **Kerangka Pikir**

Beberapa hal yang dilakukan sebagai dasar bagi peneliti dalam membantu melakukan pengkajian mengenai kebijakan pemerintah khususnya pengeluaran pemerintah dengan ruang lingkup pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna tercapainya pendapatan perkapita masyarakat. Dalam pembangunan suatu daerah, yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan adalah tercapainya tingkat kemakmuran yang tinggi. Pengeluaran pemerintah daerah yang tercantum didalam APBD, yakni dana dari pemerintah pusat yang turun untuk daerah secara besar dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah antara lain: belanja rutin dan belanja pembangunan.

Dalam suatu pengalokasian anggaran pembiayaan pembangunan pada program atau proyek terjadi defisit anggaran, maka diperlukan tambahan dana/modal untuk mengatasi defisit tersebut. Dana tambahan tersebut biasa diperoleh melalui investasi swasta, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sehingga diharapkan dapat membantu proses kelancaran pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari data PDRB Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menganalisis tentang pengaruh PMA, PMDN dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB daerah Kabupaten Bone, digambarkan pada halaman selanjutnya.

Penanaman Modal Asing

(PMA), (X1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone (Y)

Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN),

(X2)

Pengeluaran Pemerintah Daerah, (X3)

*Bagan kerangka pikir*

1. **Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, kerangka pikir dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone.
2. Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kantor Promosi dan Penanaman Modal (KPPM) Daerah Kabupaten Bone, dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Statistik di Kabupaten Bone.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan kumpulan dari seluruh elemen sejenis yang dibedakan menjadi objek penyelidikan/penelitian. Populasi harus diberikan batasan yang tegas. Sampel adalah bagian (sebagian kecil) dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan elemen atau komponen-komponen dari kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu:

1. Data Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Bone tahun 2000-2010.
2. Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Bone tahun 2000-2010.
3. Data pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bone tahun 2000-2010.

68

1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Bone tahun 2000-2010.
2. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kantor Promosi dan Penanaman Modal (KPPM) Daerah Kabupaten Bone, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Statistik di Kabupaten Bone. Secara rinci data yang dipergunakan:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Bone. Data yang digunakan adalah tahun 2000-2010, dinyatakan dalam juta rupiah.
2. Penanaman Modal Asing (PMA); menggunakan data realisasi nilai Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bone, dinyatakan dalan juta rupiah.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); menggunakan data realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Bone, dinyatakan dalam juta rupiah.
4. Pengeluaran pemerintah; menggunakan data realisasi total belanja daerah pemerintah (APBD) di Kabupaten Bone, dinyatakan dalam juta rupiah.

Data yang digunakan adalah data sekunder selama periode tahun 2000-2010. Harga konstan dengan memakai tahun dasar 2000 digunakan sebagai dasar pengamatan dengan pertimbangan perkembangan angka-angka pendapatan regional dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil/nyata dan bukan dipengaruhi oleh perubahan harga, baik harga naik maupun turun.

1. **Definisi Operasional Variabel**

Beberapa definisi operasional variabel dalam penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam waktu tertentu (Rupiah/Tahun).

Data PDRB digunakan adalah PDRB Kabupaten Bone atas dasar harga konstan tahun 2000. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB harga konstan menunjukkan harga tahun 2000 sebagai tahun dasar. Data PDRB yang dibutuhkan adalah data PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bone pada tahun 2000-2010. Data PDRB dikeluarkan oleh BPS dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

1. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Bone, dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah realisasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Bone, dinyatakan dalam satuan rupiah
3. Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah realisasi total belanja daerah di Kabupaten Bone, besarnya pengeluaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan dalam rupiah.
4. **Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif regresi berganda.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pencatatan data yang bersumber dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Promosi dan Penanaman Modal (KPPM), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Statistik Kabupaten Bone dan terbitan resmi pemerintah maupun dengan cara studi pustaka dari literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1. **Metode Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan/hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang dimaksudkan untuk mengamati hubungan antara variabel independen investasi swasta dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone.

Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif, dalam hal ini menggunakan rata-rata, prosentase, dan tabel frekuensi.
2. Analisis dengan menggunakan statistik inferensial. Hal ini untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, dalam hal ini menggunakan regresi linier berganda (Sugiono, 2008:277) dengan rumus:

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b2X2 + ei

Keterangan :

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X1 = Penanaman Modal Asing (PMA)

X2 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

X3 = Pengeluaran pemerintah daerah

b1 = Koefisien regresi (parameter)

b2 = Koefisien regresi (parameter)

b3 = Koefisien regresi (parameter)

b0 = Konstanta (intercept)

ei = Faktor kesalahan

Selanjutnya, untuk menentukan pengaruh dan tingkat signifikan digunakan α = 0,05 atau 5% dapat diuji dengan menggunakan uji-F dan uji-t melalui program SPSS 17.0 *for windows*.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Sejarah Singkat Kabupaten Bone**

Sejarah awal dimulai dengan kedatangan Manurunge Ri Matajang sekitar tahun 1326 yang merupakan cikal bakal terbentuknya pemerintahan Kerajaan Bone dan Baginda itulah sebagai Raja Bone yang pertama. Manurunge Ri Matajang kawin dengan Manurunge Ri Toro, dan keturunan beliaulah yang menggantikan kedudukan baginda secara hierarki turun temurun sampai tahun 1951 (Raja Bone Terakhir) ± 631 tahun lamanya. Menurut cerita rakyat bahwa sebelum kedatangan Manurunge Ri Matajang di negeri ini sudah ada 7 (tujuh) Wanua (negeri kecil) yang dipimpin oleh orang yang dituakan di masing-masing negeri, mengatur kehidupannya sendiri-sendiri. Masa itu disebut masa kegelapan (sianre Bale Tauwe) artinya siapa yang kuat, maka dialah yang berhak bertahan untuk hidup dan berkuasa.

Asal mula terbentuknya pemerintahan Kerajaan Bone di bawah dinasti Manurunge Ri Matajang membawa cakrawala kehidupan masyarakat yang baru di 7 (tujuh) negeri, yaitu membebaskan rakyat dari masa kegelapan, menuju pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Baginda dinobatkan sebagai Raja Bone pertama tidak dengan paksaan, tetapi masyarakat itu sendiri sepakat datang berbondong-bondong memohon kesediaan beliau menjadi raja dan panutan mereka.

73

Menurut beberapa catatan peristiwa bersejarah tentang Kerajaan Bone, selama ± 631 tahun ada 33 (tiga puluh tiga) generasi yang mengendalikan pemerintahan dibawah “Dinasti Manurunge Ri Matajang” dengan sistem Monarki konstitusi. Sebagai konsekwensi Proklamasi 17-8-1945, sistem pemerintahan monarki konstitusi dihapuskan menuju tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah, di masa pemerintahan “Soekarno” Presiden RI yang pertama kita telah mencoba sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer. Namun karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka di masa pemerintahan Soeharto Presiden RI yang kedua, dicoba lagi dengan Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 inipun ternyata belum sesuai.

Kemudian di Era Reformasi, uji coba perubahan tentang mekanisme Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dilakukan untuk mencari bagaimana bentuk dan wujud Demokrasi Pancasila yang murni seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itu, yang berakar dari kebudayaan serta nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia ini sendiri.

Pada tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ke tangan penjajah dan terbentuk pemerintahan sendiri (Zelf Bestur) dibawah pengawasan Belanda, berhubung karena sejak tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri, tahta Kerajaan Bone tidak terisi maka atas usaha Belanda pada tahun 1931 diangkat La Tenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya Ri Gowa menjadi raja Bone ke-32 (1931-1946). Oleh karena itu Raja Bone ke-32 tidak menerima keberadaan NICA maka pada awal tahun 1946 menarik diri dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Raja Bone ke-33 La Pabbenteng Petta MatinroE Ri Matuju yang bertahta (1946-1951).

Selanjutnya sistem kerajaan berubah dan mengikuti sistem pemerintahan Republik Indonesia dan kepemimpinan dipegang oleh seorang Kepala Daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 1 Tahun 1990 Tanggal 15 Februari 1990 ditetapkan Hari Jadi Bone pada tanggal 6 April 1330. Dengan demikian Hari Ulang Tahun Bone ditetapkan pada tanggal 6 April.

1. **Pemerintahan Kabupaten Bone**

Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang diperinci menjadi 331 (tiga ratus tiga puluh satu) desa dan 41 (empat puluh satu) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) dan lingkungan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu).

Wilayah Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Kahu terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Kajuara terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Salomekko terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Tonra terdiri dari 11 desa. Kecamatan Patimpeng terdiri dari 10 desa. Kecamatan Libureng terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Mare’ terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Sibulue terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Cina terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Barebbo terdiri dari 18 desa. Kecamatan Ponre terdiri dari 9 desa. Kecamatan Lappariaja terdiri dari 9 desa. Kecamatan Lamuru terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 11 desa. Kecamatan Bengo terdiri dari 9 desa. Kecamatan Ulaweng terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Palakka terdiri dari 15 desa. Kecamatan Awangpone terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Tellu Siattinge terdiri dari 15 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Amali terdiri dari 15 desa. Kecamatan Ajangale terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Dua Boccoe terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Cenrana terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Tanete Riattang Barat terdiri dari 8 kelurahan. Kecamatan Tanete Riattang terdiri dari 8 kelurahan. Serta Kecamatan Tanete Riattang Timur terdiri dari 8 kelurahan juga.

1. **Keadaan Geografis dan Penduduk**

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke arah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4º13’-5º06’ Lintang Selatan dan antara 119º42’-120º40’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

* Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
* Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
* Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut:

* Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)
* Ketinggian 25-100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
* Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)
* Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)
* Ketinggian 750 meter keatas 40.080 Ha (13,76%)
* Ketinggian 1000 meter keatas 6.900 Ha (1,52%)

Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian Utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kemiringan lereng 0-2%

(datar) : 164.602 Ha (36,1%)

1. Kemiringan lereng 0-15%

(landai & sedikit bergelombang) : 91.519 Ha (20,07%)

1. Kemiringan lereng 15-40%

(bergelombang) : 12.399 Ha (24,65%)

1. Kemiringan lereng ˃40%

(curam) : 12.399 Ha (24,65%)

Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu:

* 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%)
* 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%)
* 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%)
* Lebih besar dari 90 cm seluas 183.740 Ha (40,30%)

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial, Gleyhumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah Mediteran seluas 67,6% dari total wilayah, kemudian Renzina 9,59% dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya dapat dijelaskan sebagai berikut: sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperature berkisar 26°C-43°C. pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata ˂1.750 mm; 1.750-2.000 mm; 2.000-2.500 mm, dan 2.500-3.000 mm.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne, dan Sungai Lekoballo.

Selanjutnya, kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan seperti Program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2010 sebanyak 717.682 jiwa yang terdiri dari 341.614 jiwa laki-laki dan 376.068 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 90,84. Ini berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan perempuan terdapat 91 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 48.532 jiwa, disusul Kecamatan Tanete Riattang Barat sebanyak 43.512 jiwa, kemudian Kecamatan Tanete Riattang Timur sebanyak 40.393 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tonra sebanyak 12.830 jiwa, terus Kecamatan Ponre sebesar 13.198 jiwa, kemudian Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 13.771 jiwa, hal ini dipicu oleh karena ketiga Kecamatan tersebut merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Bone. Dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2009-2010 sebesar 0,83%.

Adapun sasaran yang ingin dicapai di Kabupaten Bone adalah peningkatan produktifitas dan kualitas tanaman pangan. Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan inmum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai.

 Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bone didominasi sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Luas panen tanaman padi di Kabupaten bone akhir tahun 2010 sebesar 141.931 hektar sedangkan produksinya tercatat 832.507 ton gabah kering giling atau rata-rata produksi 5,87 ton/hektar. Luas panen tanaman jagung 45.745 Ha dan produksi mencapai 217.632 ton atau rata-rata 4,76 ton/ha, ubi kayu 815 Ha dan produksi mencapai 8.120 ton, ubi jalar 667 Ha dan produksi mencapai 5.586 ton, kacang tanah 12.545 Ha dan produksi 20.875 ton, kedelai 12.358 Ha dan produksi 21.647 ton dan kacang hijau 2.876 Ha dengan produksi 3.974 ton.

Usaha pokok lain yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan adalah intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. Tanaman perkebunan di Kabupaten Bone termasuk banyak namun yang termasuk dalam komoditi andalan tahun 2006 (produksi yang relatif banyak dari beberapa komoditi yang ada di Kabupaten Bone) antara lain coklat 9.260 ton, kelapa 12.947 ton, tebu 61.772 ton, kemiri 7.148 ton, dan cengkeh 2.111 ton.

Hutan sebagai sumber daya alam adalah merupakan modal kekayaan bangsa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena hutan juga berfungsi sebagai daerah penyangga terutama sangat berperan dalam menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan hidup. Dengan demikian hutan perlu dilindungi, dikelola atau dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat sekaligus dijaga kelestariannya, tentunya dengan melakukan usaha seperti reboisasi dan penghijauan bagi hutan/tanah yang nampak mulai gundul. Kegiatan rehabilitas lahan pada tahun 2010 ditunjukkan pada lahan yang perlu direhabilitasi di dalam kawasan yang luasnya mencapai 23.176 Ha.

Sumber protein yang utama bagi manusia berasal dari protein hewani termasuk ikan. Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat melalui indikator naik turunnya populasi ternak dan unggas. Populasi ternak besar (sapi, kuda, kernau dan kambing) di Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2009-2010 mengalami peningkatan 10,26%. Sedangkan ternak unggas (ayam ras telur, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik) dalam kurun waktu 2009-2010 mengalami kenaikan 27,21%.

Kabupaten Bone juga terletak di pinggir pantai yang berpotensi terhadap sub sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Pada sub sektor perikanan laut, jumlah perahu tanpa motor dan perahu pakai motor penangkap ikan tahun 2010 masing-masing tercatat 506 buah dan 2.510 buah. Untuk sub sektor perikanan darat menurut jenis pemeliharaan meliputi tambak dan kolam masing-masing luasnya tercatat sebesar 15.244 Ha dan 1.970 Ha.

Berikutnya, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, sumbangan sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bone sebesar 6,93%. Jumlah unit usaha sektor industri pengolahan di Kabupaten Bone pada tahun 2010 sebesar 5.762. Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan di tahun 2010 sebanyak 18.957 orang. Peningkatan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan ini akibat dari adanya kemudahan-kemudahan dalam proses investasi dan tersedianya sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memacu sektor industri agar lebih efisien dan mampu bersaing pada pangsa pasar. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya nilai investasi dan nilai produksi pada sektor ini.

Potensi lain di Kabupaten Bone yang cukup besar adalah pertambangan, yang terdiri dari emas, batu bara, pasir silika, tembaga, mangan, endapan besi, batu gamping, marmer, pasir kuarsa, dan lain-lain. Namun, sampai saat ini belum ada yang diolah.

Kegiatan sebagian penduduk di Kabupaten Bone dan merupakan salah satu sektor yang penting dalam ekonomi adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan dalam hal ini tidak hanya menangani suatu komoditas tertentu dari produsen kepada konsumen tetapi termasuk pula jasa angkutan. Pemerintah senantiasa memberi kemudahan-kemudahan dan pelayanan di dalam proses perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah perusahaan yang memperoleh surat izin usaha perdagangan menurut golongan usaha di Kabupaten Bone sebanyak 1.073 usaha pada tahun 2010 yang terdiri dari usaha perdagangan kecil tercatat 781 usaha, usaha perdagangan menengah tercatat 272 usaha serta usaha perdagangan besar tercatat 20 usaha. Selama tahun 2010, Kabupaten Bone mengalami surplus beras yang ditandai dengan pengiriman beras ke berbagai daerah (Sul-Teng, Sul-Tra, Kal-Sel, NTB dan Papua) yang jumlahnya mencapai 6.459 ton.

Adapun infrastruktur yang dimiliki Kabupaten Bone sebagai berikut

1. Perhubungan

Kabupaten Bone membuat suatu kebijaksanaan pembangunan transportasi yang diarahkan untuk berperan sebagai urat nadi kehidupan perekonomian daerah dan sekaligus menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pengembangan wilayah dan hubungan antara daerah sekaligus membuka daerah yang masih terisolasi.

Panjang jalan nasional di Kabupaten Bone pada tahun 2010 adalah 218.860 km. Sedangkan panjang jalan Provinsi pada tahun 2010 adalah 173.650 km. Angkutan laut merupakan salah satu sarana vital bagi perekonomian Kabupaten Bone. Di Kabupaten Bone terdapat 8 pelabuhan. Salah satu diantaranya adalah Pelabuhan Penyeberangan Bajoe yang merupakan pelabuhan nasional. Dua pelabuhan regional, 4 pelabuhan lokal dan 1 pelabuhan yang belum terdaftar.

1. Pos dan telekomunikasi

Berbagai sarana pos dan telekomunikasi telah dikembangkan antara lain tersedianya kantor pos, telepon dan telegram. Lalu lintas surat pos yang dikirim di dalam negeri pada tahun 2010 tercatat 70.671 dan yang terkirim ke luar negeri tercatat 462. Sedangkan lalu lintas surat pos yang diterima dari dalam negeri pada tahun 2010 tercatat sebanyak 259.639 dan dari luar negeri tercatat sebanyak 462. Dewasa ini sambungan induk telepon di Kabupaten Bone mengalami stagnasi. Peningkatan pesat terjadi pada telepon seluler. Sejak tahun 2007 seluruh kecamatan di Kabupaten Bone sudah dijangkau jaringan telepon seluler.

1. Hotel dan pariwisata

Sektor pariwisata dewasa ini semakin penting karena merupakan sumber devisa bagi Negara, merangsang perekonomian daerah (sumber penghasilan daerah) serta menciptakan lapangan kerja.

Untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bone tidak ketinggalan di dalam mengembangkan obyek-obyek wisatanya walaupun daerah ini belum ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat beberapa objek wisata di Kabupaten Bone baik obyek wisata alam maupun obyek wisata budaya. Untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut di Kabupaten Bone terdapat 22 hotel/penginapan dengan jumlah kamar 356 dan 679 tempat tidur. Dan diharapkan penginapan tersebut dapat menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang di Kabupaten Bone.

1. **Profil Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Bone**
2. **Perekonomian**

Kemajuan perekonomian Kabupaten Bone dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya, perkembangan ekonomi Kabupaten Bone selama kurun waktu 2006-2010 dari tahun ke tahun semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan angka PDRB atas dasar harga berlaku yang selalu mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan, angka tersebut memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Berlaku, tahun 2006 -2010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PDRB Sul-Sel (milyar rupiah) | PDRB Kab. Bone (milyar rupiah) | Persentase Kab. Bone terhadap Sul-Sel |
| 20062007200820092010 | 60.902,8269.271,9285.143,1999.954,60117.830,27 | 3.860,834.414,335.348,746.412,657.530,37 | 6,346,376,286,426,39 |

Sumber: BPS Kabupaten Bone dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah)

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Bone dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi kontribusi PDRB Kabupaten Bone terhadap pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil dan berfluktuasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan ekonomi regional wilayah lain yang juga terus mengalami peningkatan dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bone.

 Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Mulai pada tahun 2000, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Adapun pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Bone selama periode 2006–2010 dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4. 2 Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2006-2010

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PDRB harga berlaku(Milyar rupiah) | Persentase (%) | PDRB harga konstan (Milyar Rupiah) | Persentase (%) |
| 200520062007200820092010 | 3.327,723.860,834.414,335.348,746.412,657.530,37 | 16,0214,3421,1719,8917,43 | 2.305,162.442,412.589,302.776,672.985,923.213,09 | 5,956,017,247,547,61 |
| **Rata-rata** | **17,77** |  | **6,87** |

Sumber: BPS Kabupaten Bone (data diolah)

Periode tahun 2006–2010 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bone relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan 6,87% per tahun. Kinerja ekonomi Kabupaten Bone mulai membaik sejak tahun 2005. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone yang semakin meningkat, hingga pada tahun 2006 tumbuh mencapai 5,95% kemudian bertambah baik pada tahun 2007 dengan pertumbuhan sebesar 6,01% dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone tumbuh sebesar 7,24%. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi semakin meningkat hingga mencapai 7,54%. Selanjutnya pada tahun 2010, pertumbuhan terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,61%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bone stabil dari tahun ke tahun karena terus-menerus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone ditopang oleh sektor pertanian, walaupun beberapa sektor mengalami perlambatan yaitu sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor LGA (listrik, gas, dan air), sektor bangunan, sektor perdagangan dan hotel, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Produk menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bone Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah) dan Distribusi PDRB (%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lapangan Usaha | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Pertanian | 2.174.728,9656,33 | 2.403.953,4454,34 | 2.818.222,3252,69 | 3.202.168,6349,94 | 3.696.514,9449.09 |
| Pertambangan dan Galian | 15.245,020,39 | 22.867,530,52 | 30.886,440,58 | 39.702,970,62 | 48.202,970,64 |
| Industri Pengolahan | 322.597,568,36 | 366.304,888,28 | 407.040,847,61 | 447.620,976,98 | 522.122,896,93 |
| Listrik, Gas dan Air | 36.592,910,95 | 37.480,600,85 | 41.666,190,77 | 46.731,740,73 | 54.446,590,72 |
| Bangunan  | 162.300,314,20 | 245.439,905,55 | 329.351,496,16 | 432.274,646,74 | 573.043,297,61 |
| Dagang, Resto dan Hotel | 306.030,677,93 | 327.756,817,41 | 391.012,067,31 | 457.714,167,14 | 559.462,947,43 |
| Angkutan dan Komunikasi | 180.580,314,68 | 241.056,345,45 | 281.205,225,26 | 308.224,874,81 | 345.241,644,58 |
| Keu., Sewa dan Jasa Perusahaan  | 192.715,864,99 | 230.391,145,21 | 279.769,225,23 | 332.418,765,18 | 404.273,205,37 |
| Jasa-jasa | 470.039,3512,17 | 548.492,9612,39 | 769.591,2114,39 | 1.145.792,6617,87 | 1.327.088,3517,62 |
| PDRB | 3.860.830,96100,00 | 4.423.743,58100,00 | 5.348.744,99100,00 | 6.412.649,40100,00 | 7.530.369,81100,00 |

Sumber: BPS Kabupaten Bone (data diolah)

Sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Bone tiap tahun mengalami kenaikan namun terus mengalami penurunan dalam distribusinya terhadap PDRB. Adapun subsektor pertanian yang memiliki peran yang cukup besar adalah pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan yang diarahkan untuk meningkatkan produksi padi. Sedangkan sektor jasa-jasa yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berbeda dengan sector pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB terus berkurang, sektor jasa-jasa justru mengalami peningkatan pertumbuhan terus menerus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja sektor perdagangan, restoran dan hotel yang merupakan pemberi kontribusi terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bone. Kontribusi sektor perdagangan, restoran dan hotel tiap tahun berfluktuasi namun sektor perdagangan, restoran dan hotel ini merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 7,14 persen kemudian naik menjadi 7,43 persen pada tahun 2010.

Kabupaten Bone juga merupakan daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup maju di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 Kabupaten Bone menempati urutan ke enam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | KABUPATEN/KOTA | PERTUMBUHAN EKONOMI (%) |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. | SelayarBulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar GowaSinjaiMarosPangkajene KepulauanBarruBoneSoppengWajoSidenreng RappangPinrangEnrekangLuwuTana TorajaLuwu UtaraLuwu TimurToraja UtaraKota MakassarKota ParepareKota Palopo | 8,016,277,907,256,856,056,037,036,346,017,634,455,634,456,235,006,956,275,9316,157,009,838,477,29 |
| **SULAWESI SELATAN** | **6,08** |

Sumber: BPS Kabupaten Bone tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel 4.4 terlihat bahwa pada tahun 2010 Kabupaten Bone memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,63% yang merupakan urutan ke enam setelah Luwu Timur, Kota Makassar,Kota Parepare, Selayar, dan Bantaeng. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun.

Perekonomian yang terus mengalami perkembangan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita. Angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata. Namun angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Setiap tahun PDRB perkapita Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan. Dalam lima tahun terakhir misalnya pada tahun 2005-2010 meningkat 1,2 kali lipat lebih. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Kabupaten Bone meningkat 1,2 kali lipat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bone tahun 2006-2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Atas Dasar Harga Berlaku | Atas Dasar Harga Konstan |
| PDRB perkapita (rupiah) | Pertumbuhan (%) | PDRB Perkapita(rupiah) | Pertumbuhan (%) |
| 200520062007200820092010 | 4.792.8325.541.5026.324.3867.579.1649.009.71910.492.627 | 15,6214,1319,8418,8716,46 | 3.325.4393.505.6283.701.7793.934.5234.195.1964.477.682 | 5,425,606,296,636,73 |
| **Rata-rata** | **16,98** |  | **6,13** |

Sumber: BPS Kabupaten Bone (data diolah)

PDRB perkapita penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Angka PDRB Perkapita Kabupaten Bone sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 berfluktuasi. Angka ini memberikan gambaran seberapa besar sumbangan tiap orang (per kapita) terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone. Besaran PDRB perkapita diukur melalui PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk pertengah tahun. Sedangkan secara riil, peningkatannya diukur melalui pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000. Seiring dengan perubahan nilai tambah dan peningkatan jumlah penduduk, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2005 tercatat PDRB per kapita sebesar Rp.4.792.832,00 kemudian pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp.5.541.502,00. Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp.10.492.627,00 pada tahun 2010. Sedangkan pertumbuhan PDRB per kapita riil pada tahun 2006 tumbuh sebesar 5,42 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Periode tahun 2005–2010 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bone relatif stabil dengan rata-rata PDRB per kapita riil (atas dasar harga konstan) sebesar 6,13% per tahun dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,98% per tahun.

1. **Hasil Penelitian**
2. **Analisis Variabel Penelitian**
3. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (*Value Added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Dalam penelitian ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

Adapun perkembangan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan di Kabupaten Bone sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 disajikan pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Perkembangan PDRB Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(juta Rp.) | Perkembangan(%) | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta Rp.) | Perkembangan(%) |
| 1999 | 1.801.625,53 | - | 788.369,05 | - |
| 2000 | 1.992.007,55 | 10,57 | 809.447,07 | 2,67 |
| 2001 | 2.282.520,84 | 14,58 | 836.736,92 | 3,37 |
| 2002 | 2.632.084,05 | 15,31 | 877.961,43 | 4,93 |
| 2003 | 2.915.609,11 | 10,77 | 922.923,54 | 5,12 |
| 2004 | 2.978.646,53 | 21,62 | 2.209.958,50 | 139,45 |
| 2005 | 3.327.715,77 | 11,72 | 2.305.158,94 | 4,31 |
| 2006 | 3.860.830,96 | 16,02 | 2.442.413,22 | 5,95 |
| 2007 | 4.414.334,60 | 14,34 | 2.589.298,03 | 6,01 |
| 2008 | 5.348.744,99 | 21,17 | 2.776.660,08 | 7,24 |
| 2009 | 6.412.649,40 | 19,89 | 2.985.992,41 | 7,54 |
| 2010 | 7.530.369,81 | 17,43 | 3.213.085,05 | 7,07 |
| Rata-rata | 15,77 |  | 17,61 |

Sumber : BPS Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

Gambar 4.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar grafik 4.1 perkembangan PDRB Kabupaten Bone menunjukkan bahwa pada tahun 2004 PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bone mengalami peningkatan drastis. Tampak pada tahun 2004 terjadi pertumbuhan PDRB terbesar, dimana pada tahun 2004 terjadi pertumbuhan sebesar 139,45 persen atau meningkat dari Rp. 922.923,54 juta pada tahun 2003 menjadi Rp. 2.209.958,50 juta pada tahun 2004. PDRB Kabupaten Bone baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rata-rata perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku yakni 15,7% per tahun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 17,61% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bone stabil, berarti Kabupaten Bone mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah tersebut.

1. **Penanaman Modal Asing (PMA)**

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Banyak faktor yang mempengaruhi investasi di daerah. Salah satunya faktor kelembagaan yang berkaitan dengan kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Investasi dalam penelitian ini yakni investasi berupa penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Upaya Kabupaten Bone untuk membuka diri dalam hubungan dengan perekonomian dunia ditujukan agar mampu menunjang pembangunan terutama dari sisi ekonomi daerah. Arus masuk modal asing juga berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Dewasa ini hampir semua daerah membutuhkan modal asing. Modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu daerah. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu Negara, seperti stabilitas ekonomi, politik Negara, penegakan hukum. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian daerah tempat modal itu ditanamkan serta bagi Negara asal para investor.

Kebijakan mengundang pemodal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan subtitusi impor, sehingga daerah Kabupaten Bone dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas, serta terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kabupaten Bone. Sepanjang tahun 2010, investasi asing yang masuk di Kabupaten Bone mencapai US $ 185.000 mengalami peningkatan yang cukup sigifikan yaitu sebesar 45,95 persen dari tahun 2009 yang hanya mencapai sebesar US $ 85.000. Para investor masih melirik sektor pertambangan sebagai tempat menanamkan modalnya, karena sektor ini masih cukup menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi.

Kabupaten Bone memperoleh investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Data investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdapat di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7 Perkembangan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Bone Tahun 2000 - 2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAHUN | PMA (Rupiah) | Perkembangan (%) |
| 2000 | 1.000.000.000  | - |
| 2001 | 1.000.000.000  | 0 |
| 2002 | 1.150.000.000  | 86,96 |
| 2003 | 2.700.000.000  | 42,59 |
| 2004 | 3.350.000.000  | 80,60 |
| 2005 | 3.700.000.000  | 90,54 |
| 2006 | 2.150.000.000  | (58,11) |
| 2007 | 1.650.000.000  | (76,74) |
| 2008 |  650.000.000  | (39,40) |
| 2009 |  850.000.000  | 76,47 |
| 2010 | 1.850.000.000  | 45,95 |
| **Rata-rata 1.822.727.272,73** | **22,62** |

Sumber : KPPM Kabupaten Bone Tahun 2000-2010 (kurs 10.000)

Gambar 4. 2. Perkembangan Penanaman Modal Asing Kab. Bone 2000-2010

Berdasarkan data investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tabel 4.7 dan grafik pada gambar 4.2 menunjukkan perkembangan investasi PMA di Kabupaten Bone berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian di Kabupaten Bone tidak stabil, sehingga mempengaruhi investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bone. Pada saat kondisi perekonomian daerah Kabupaten Bone membutuhkan dana tambahan untuk pembiayaan pembangunan daerah disaat itulah daerah membutuhkan bantuan investor untuk menanamkan modalnya. Namun, jika kondisi yang sebaliknya dimana perekonomian pemerintah memiliki dana yang mencukupi untuk pembangunan daerah maka pemerintah akan mengurangi permintaan terhadap PMA.

Masalah PMA di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kelembagaan dan faktor infrastruktur fisik.

1. Faktor kelembagaan

Dari segi kelembagaan yang dimaksud adalah tidak ada kepastian hukum. Contoh nyata dari hal tersebut adalah dengan adanya pungutan liar di luar peraturan. Selain daripada itu, adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah daerah yang semestinya memberi pelayanan publik dan infrastruktur fisik kepada masyarakat dan merumuskan peraturan kepada dunia usaha sehingga menurunkan daya tarik investasi ke daerah. Serta prosedur yang diperumit dan biaya yang diatur dalam peraturan Daerah yang lumayan tinggi, mengurangi daya tarik investor terhadap daerah Kabupaten Bone khususnya.

1. Faktor infrastruktur fisik

Kurang tersedianya fasilitas serta prasarana fisik seperti jalan raya yang tidak memadai, kendaraan umum yang tidak bebas menjangkau sampai ke pelosok desa, sarana komunikasi yang sulit terakses hingga di pelosok desa, sumber air bersih yang sulit diperoleh terutama di daerah pedesaan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan penyebab kurangnya investor asing yang masuk ke Kabupaten Bone.

1. **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Di era globalisasi, pasar modal atau bursa merupakan sumber pendanaan yang cukup penting, sebagai penghubung antara investor, perusahaan dan institusi pemerintahan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi. Aktivitas pasar modal juga sebagai salah satu potensi untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Dengan terciptanya keseimbangan antara pemodal asing dengan pemodal dalam negeri maka tumbuhnya kekuatan suatu daerah pada sektor swasta diharapkan mampu menjadi dinamisator aktivitas perekonomian di suatu daerah. Namun demikian pasar modal di Kabupaten Bone masih didominasi oleh pemodal dalam negeri.

Untuk lebih jelasnya, data investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdapat di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut

Tabel 4.8 Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Bone Tahun 2000 - 2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAHUN | PMDN (Rupiah) | Perkembangan (%) |
| 2000 | 17.426.500.000  | - |
| 2001 | 17.826.500.000  | 97,76 |
| 2002 | 18.576.500.000  | 95,96 |
| 2003 | 20.411.500.000  | 91,01 |
| 2004 | 20.164.000.000  | (98,79) |
| 2005 | 18.179.000.000  | (90,16) |
| 2006 | 23.529.000.000  | 77,26 |
| 2007 | 21.929.000.000  | (93,19) |
| 2008 | 20.185.000.000  | (92,05) |
| 2009 | 19.335.000.000  | (95,79) |
| 2010 | 18.435.000.000  | (95,35) |
| **Rata-rata** | **19.636.090.909,10** |  |

Sumber : KPPM Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

Gambar 4. 3. Perkembangan PMDN Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

Secara umum kondisi perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bone dari tahun 2000 hingga tahun 2010 sangat mengkhawatirkan karena investasi PMDN di Kabupaten Bone berkembang sangat lambat bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Realisasi PMDN pada tahun 2000 hingga tahun 2003 mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 97,76 persen pada tahun 2001, 95,96 persen pada tahun 2002 dan 91,01 persen pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2004 dan 2005, realisasi PMDN mengalami penurunan yakni sebesar 98,79 persen dan 90,16 persen. Hanya pada tahun 2006, investasi PMDN yang sudah terealisasikan mencapai Rp.23.529.000.000,00 atau telah terjadi peningkatan sebesar 77,26 persen dibanding tahun 2005. Realisasi PMDN pada tahun-tahun berikutnya yakni tahun 2007 hingga tahun 2010 terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa perusahaan yang pada awalnya rencana berinvestasi lebih besar, namun setelah melihat prospek proyek yang hendak dikelolah kedepannya tidak menjanjikan akhirnya investor mengurangi jumlah investasinya.

1. **Pengeluaran Pemerintah**

Pemerintah sebagai institusi yang melakukan berbagai aktivitas juga merupakan konsumen bagi barang dan jasa di dalam negeri. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Dua aspek yang terkait dengan pengeluaran pemerintah adalah pendapatan/penerimaan dan pengeluaran/belanja. Belanja pemerintah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.

Pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan endogen memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi. Adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah berbentuk pembelanjaan pemerintah, baik dalam bentuk rutin maupun untuk pembangunan. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini, pengeluaran rutin adalah pembelanjaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin seperti gaji pegawai, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pembelanjaan untuk membiayai pembangunan yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Istilah komponen data pengeluaran pemerintah tahun 2000-2002 terdiri dari belanja rutin, belanja pembangunan, urusan kas dan perhitungan, dan sisa perhitungan anggaran. Sedangkan istilah komponen data pengeluaran pemerintah tahun 2003-2006 terdiri dari aparatur daerah, pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Kemudian pada tahun 2007-2010 istilah komponen data pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, dan belanja tak terduga. Perkembangan realisasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAHUN | PENGELUARAN PEMERINTAH | PERKEMBANGAN(%) |
| 2000 | 79.008.851.000 | - |
| 2001 | 120.011.627.000 | 51,90 |
| 2002 | 281.835.022.297,54 | 134,84 |
| 2003 | 327.201.442.282,54 | 16,10 |
| 2004 | 327.202.000.000 | 0,0001 |
| 2005 | 393.000.811.585 | 20,11 |
| 2006 | 548.923.764.255,10 | 39,67 |
| 2007 | 708.743.715.071,39 | 29,11 |
| 2008 | 774.248.282.596,50 | 9,24 |
| 2009 | 808.389.682.065,41 | 4,41 |
| 2010 | 774.466.683.951,82 | (4,20) |
| Rata-rata | 29,70 |

Sumber : BAPPEDA dan statistik Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

Gambar 4. 4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2000-2010

Pada periode tahun 2000 hingga tahun 2005, secara umum pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan yang cukup stabil setiap tahun, walaupun pada tahun 2003 dan 2004 peningkatan yang terjadi hanya 0,0001% dan peningkatan yang sangat besar pada tahun 2002 yakni sebesar 134,84%. Selanjutnya pada tahun 2006, pengeluaran pemerintah mulai menunjukkan peningkatan kembali sebesar 39,67% dan terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2009 dengan laju peningkatan yang lebih cepat dari periode 2000-2005. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi yang semakin kondusif, sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Namun, pada tahun 2010, pengeluaran pemerintah menunjukkan penurunan sebesar 4,20% dari kondisi tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari sosial politik yang menyebabkan pemerintah mengalami keterbatasan dalam meningkatkan pengeluaran.

1. **Analisis Deskriptif**

Analisis deksriptif bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel-variabel penelitian. Analisis ini digunakan dengan metode regresi linear sederhana dengan melihat persentase hubungan antara variabel bebas yang terdiri dari PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Analisa mengenai hubungan variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Analisis Deskriptif PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bone

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Hasil Estimasi** |
| 1. *R* (koefisien korelasi)
2. *R Square* (koefisien determinasi)
3. *Adjusted R Square*
4. *Std. error of the estimate* (kesalahan baku estimasi)
 | 0.941 (94,1%)0.886 (88,6%)0.837 (83,7%)3.81990E5 |

Sumber: Olah data SPSS 17.0 *for windows*

Tabel 4.11 Kebermaknaan Koefisien Korelasi

|  |  |
| --- | --- |
| **Koefisien Korelasi** | **Jenis Hubungan** |
| 81% - 100%61% - 80%41% - 60%21% - 40%1% - 20% | Sangat kuatKuatSedangLemahSangat lemah |

Sumber: Statistika Terapan

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.10 nilai koefisien korelasi (R) sebesar 94,1% yang menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan sebesar 94,1% terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Sehingga jika dihubungkan dengan tabel 4.11 mengenai kebermaknaan koefisien korelasi maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel PDRB.

 Koefisien determinasi *(R Square)* menunjukkan seberapa persen variabel terikat yaitu PDRB dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah. Hasil analisis sebagaimana yang terdapat dalam tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 88,6% yang berarti bahwa 88,65% dari PDRB di Kabupaten Bone dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah. Selebihnya yaitu 11,4% (100%-88,65%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian.

Nilai adjusted R Square sebesar 83,7% mengandung makna bahwa apabila variabel bebas yang digunakan untuk mengukur PDRB di Kabupaten Bone ditambah variabel lain selain PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah maka pengaruh PDRB hanya sebesar 83,7%. Selisihnya dari koefisien determinasi yaitu 4,9% (88,6%-83,7%) adalah penjelasan PDRB oleh variabel lain (variabel yang tidak diteliti oleh peneliti) yang apabila ditambahkan dalam analisis. Kesalahan baku estimasi menunjukkan tingkat kesalahan dalam analisis ini yaitu sebesar 3.81990E5 sehingga kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam analisis adalah 3.81990E5.

1. **Hasil Analisis Data**
2. **Uji Asumsi**

Penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda perlu dilakukan pengujian persyarakatan terhadap asumsi-asumsinya terlebih dahulu, seperti uji normalitas, uji linieritas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 *for windows* melalui *test for linearity* pada taraf signifikansi 0,05. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Histogram Regression Residual yang sudah distandarkan, analisis Chi Square dan juga menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika: nilai Kolmogorov-Smirnov Z < Z tabel; atau menggunakan Nilai Probability Sig (2 tailed) > α; sig. > 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui program SPSS 17.0 *for windows* diperoleh hasil sebagai berikut

 Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

|  |
| --- |
|  |  | Standardized Residual |
| N | 11 |
| Normal Parametersa,,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | .83666003 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .231 |
| Positive | .123 |
| Negative | -.231 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .767 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .599 |

Sumber : Hasil olah data SPSS 17.0 *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Pada tabel 4.12 dengan menganalisis nilai Kolmogorov-Smirnov di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, data memiliki distribusi normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikansi 0,599 > 0,05. Sehingga data variabel penelitian ini yang terdiri dari PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB memiliki distribusi normal.

1. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 *for windows* melalui *test for linearity* pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui program SPSS 17.0 *for windows (Statistical Product and Service Solution)* diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 4.13 Ringkasan Uji Linearitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel  | F | Sig | Taraf Signifikan |
| PMA (X1) dan PDRB (Y) | 176.781 | 0,048 | 0,05 |
| PMDN (X2) dan PDRB (Y) | 0.000 | 0,000 | 0,05 |
| Pengeluaran Pemerintah (X3) dan PDRB (Y) | 0.000 | 0,000 | 0,05 |

Sumber : Hasil olah data SPSS 17.0 *Test ANOVA*

Pada tabel 4.13 menunjukkan besarnya nilai signifikansi pada *linearity* untuk masing-masing variabel bebas terhadap PDRB, untuk PMA sebesar 0,048, PMDN sebesar 0,000 dan pengeluaran pemerintah sebesar 0,000. Karena ketiga variabel tersebut nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel bebas yang meliputi PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang linier dengan variabel PDRB.

1. Uji multikolineritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Multikolinearitas atau *Kolinearitas Ganda* *(Multicollinearity*) adalah adanya hubungan linear antara peubah bebas X dalam [Model Regresi Ganda](http://id.wikipedia.org/wiki/Regresi). Jika hubungan linear antar peubah bebas X dalam Model Regresi Ganda adalah [korelasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Korelasi) sempurna maka peubah-peubah tersebut berkolinearitas ganda sempurna (*perfect multicollinearity*). Sehingga multikolinearitas merupakan hal yang dihindari dalam suatu analisis khususnya pada analisis regresi.

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 *for windows* metode *Variance Inflation faktor* (VIF) pada model regresi. Hasil pengolahan data untuk menguji multikolinearitas yang terdapat di dalam model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas metode *Variance Inflation faktor* (VIF)

|  |  |
| --- | --- |
| Model | *Collinearity Statistic* |
| *Tollerance* | VIF |
| PMA | 0.905 | 1.105 |
| PMDN  | 0.752 | 1.331 |
| Pengeluaran Pemerintah | 0.754 | 1.326 |

Sumber : Hasil olah data SPSS 17.0 *Test Coefficients*

Suatu variabel memiliki masalah multikolinearitas jika nilai VIF nya lebih besar dari 10. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan uji VIF berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas yang ada yaitu PMA sebesar 1,105, PMDN sebesar 1,331, dan pengeluaran pemerintah sebesar 1,326 memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari taraf *tolerance* yang digunakan yaitu 10 sehingga ketiga variabel tersebut tidak mengandung masalah multikolinearitas. Artinya tidak terdapat hubungan atau korelasi antara variabel bebas (PMA, PMDN dan pengeluaran pemerintah). Selain itu, tidak adanya masalah multikolinearitas pada variabel-variabel ini yang dilihat dari nilai tolerance PMA 0,905, PMDN 0,752 dan pengeluaran pemerintah 0,754 yang memiliki nilai lebih besar taraf tolerance 10 % (0,10).

1. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Heteroskedastisitas muncul apabila error atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 *for windows* dengan metode uji Glesjer.

Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glesjer

| Model | T | Sig. |
| --- | --- | --- |
|
| PMA | 0.534 | 0.610 |
| PMDN | 1.483 | 0.182 |
| PengeluaranPemerintah | -2.206 | 0.063 |

Sumber: Olah data SPSS 17.0 *Coefficientsa*

Gejala heteroskedastisitas terjadi jika nilai taraf signifikan t (sig\_t) lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan sehingga untuk menghindari adanya gejala heteroskedastistas diharapkan taraf signifikan yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan. Taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah taraf signifikan 0,05 (taraf kesalahan 5%). Berdasarkan hasil uji glesjer pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai taraf signifikan yang lebih besar dari 0,05 dimana PMA sebesar 0,610, PMDN sebesar 0,182 dan pengeluaran pemerintah sebesar 0,063 sehingga data variabel penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas. Artinya data tersebut tidak terdapat ketidaksamaan varian (ragam) dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi.

1. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series) atau untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan melalui uji Durbin Waston (DW).

Uji autokorelasi pada penelitian ini sebagaimana terlihat pada tabel 4.16

Tabel 4.16 Uji Autokorelasi Durbin Watson

|  |  |
| --- | --- |
| **Model**  | **Durbin-Watson** |
| 1 | 1.976 |

Sumber : Olah data SPSS 17.0 *Model Summaryb*

Tabel 4.16 menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,976. Dari tabel DW dengan jumlah sampel (n = 11) dan k = 3 pada taraf signifikan 0,05 atau 5% diperoleh nilai du=1,928 dan dL=0,595. Kriteria pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan Durbin Watson dapat dilihat pada grafik 4.5

Reject H1 evidence of positif auto corelation

Zona of indecision

Zona of indecision

Reject H0 evidence of positif auto corelation

Donot reject H0 or H1 or both

4-dL=3,405

4-du=2,072

du=1,928

dL=0,595

2

4

0

Gambar 4. 5. Kriteria Pengujian Autokorelasi dengan Durbin Watson

Nilai Durbin Watson yaitu 1,976 berdasarkan kriteria pengujian tersebut adalah terletak diantara du=1,928 dan 4-du=2,072 sehingga data pada analisis ini tidak mengandung autokorelasi sehingga memenuhi kriteria pengujian. Data yang tidak mengandung autokorelasi menunjukkan tidak adanya saling keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang merupakan salah satu syarat untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

1. **Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda**

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai X1, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai X2, dan pengeluaran pemerintah daerah sebagai X3. Sedangkan yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah PDRB sebagai Y.

Data-data yang terdapat pada masing-masing variabel bebas (PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah) dan satu variabel terikat (PDRB) yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis dengan menggunakan alat analisis statistik inferensial, yaitu regresi linier berganda. Analisis statistik inferensial dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 *for windows (Statistical Product and Service Solution).* Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan Uji F dan uji t. Uji F atau uji simultan antara tingkat Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah secara bersamaan terhadap PDRB dan Uji t antara Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah secara parsial (terpisah) terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Hasilnya dapat dilihat sebagaimana yang terangkum pada tabel 4.17 berikut ini

Tabel 4. 17 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bone

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel  | Tanda harapan | β | t-hitung | Sig  |
| Penanaman Modal Asing (PMA)(X1)Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)(X2) Pengeluaran Pemerintah (X3) | +++ | 238,311-56,5773,517 | 1,959-0,7556,785 | 0,0310,4750,000 |
| Intercept (β0) | 1.031.188,503 |
| F hitung | 18,137 |
| Sig\_F | 0,001 |
| F tabel | 4,35 |
| T tabel  | 1,90 |
| Sampel (n) | 11 |
| Taraf signifikan (α) | 0,05 |

Sumber: Olah Data SPSS 17.0 *For Windows*

Hasil olah data analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bone dengan jumlah sampel adalah 11 yaitu data selama 11 tahun (2000-2010) dengan taraf signifikan 0,05 (taraf kesalahan 5%).

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan pada pada tabel 4.17 ditunjukkan oleh nilai F hitung dan nilai sig-F. Kriteria uji simultan adalah jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau jika taraf signifikan F lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0,05 maka hasil analisis secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan. Jika hasil yang diperoleh adalah sebaliknya maka analisis tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan.

Nilai F hitung pada analisis tersebut adalah 18,137 yang lebih besar dari F tabel yaitu 4,35. Taraf signifikan F adalah 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu (α) 0,05. Dengan demikian maka PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Hal ini berarti setiap pengembangan PMA, PMDN dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan PDRB di Kabupaten Bone. Dengan semakin besarnya investasi baik berupa PMA maupun PMDN serta semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan daerah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di Kabupaten Bone hingga pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bone.

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial pada tabel 4.17 ditunjukkan oleh nilai t hitung dan nilai sig-t. Kriteria uji parsial adalah jika nilai thitung lebih besar dari ttabel atau jika taraf signifikan t lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0,05 maka hasil analisis secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Jika hasil yang diperoleh adalah sebaliknya maka analisis tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel 4.18 disajikan hasil perhitungan uji t dan koefisien korelasi parsialnya sebagai berikut

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Uji-t

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel Regresi | Koefisien Regresi | t-hitung | t-tabel | Sig. | Keterangan  |
| X1X2X3 | 238.311-56.5773.517 | 1,959-0,7556,785 | 1,901,901,90 | 0,0310,4750,000 | Signifikan Tidak SignifikanSignifikan  |

Sumber: Olah Data SPSS 17.0 *For Windows*

Persamaan regresi PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB di Kabupaten Bone berdasarkan tabel 4.17 pada halaman 116 adalah $Y=1.031.188,503+238.311X1-56.577X2+3.517X3$. Hal ini berarti bahwa jika PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah adalah nol maka PDRB adalah sebesar $1.031.188,503$.

PMA terhadap PDRB di Kabupaten Bone berdasarkan hasil perhitungan uji-t pada tabel 4.18 halaman 118 menunjukkan adanya pengaruh PMA terhadap PDRB berpengaruh signifikan. Nilai t hitung pada variabel tingkat PMA terhadap PDRB di Kabupaten Bone adalah 1,959 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,90 dan taraf signifikan t PMA sebesar 0,031 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0,05 sehingga berdasarkan kriteria tersebut, PMA secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Koefisien variabel (β) sebesar 238,311X1 pada PMA menunjukkan hubungan yang positif antara PMA dan PDRB di Kabupaten Bone. Jika nilai PMA bertambah satu satuan menyebabkan PDRB bertambah sebesar 238,311.

PMDN terhadap PDRB di Kabupaten Bone berdasarkan hasil perhitungan uji-t pada tabel 4.18 halaman 118 menunjukkan adanya pengaruh PMDN terhadap PDRB namun tidak signifikan. Nilai t hitung pada variabel tingkat PMDN terhadap PDRB di Kabupaten Bone adalah -0,755 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,90 dan taraf signifikan t sebesar 0,475 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0,05 sehingga berdasarkan kriteria tersebut, PMDN secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Koefisien variabel (β) sebesar -56,577X2 pada PMDN menunjukkan hubungan yang negatif antara PMDN dan PDRB di Kabupaten Bone. Jika nilai PMDN bertambah satu satuan menyebabkan PDRB berkurang sebesar 56,577.

Pengeluaran pemerintah berdasarkan hasil perhitungan uji-t pada tabel 4.18 halaman 118 menunjukkan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB signifikan. Nilai t hitung pada variabel pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Bone adalah 3,517 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,90 dan taraf signifikan t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0,05 sehingga berdasarkan kriteria tersebut, pengeluaran pemerintah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Koefisien variabel (β) sebesar 3,517 X3 pada pengeluaran pemerintah menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB di Kabupaten Bone. Jika pengeluaran pemerintah bertambah satu satuan menyebabkan PDRB di Kabupaten Bone akan meningkat sebesar 3,517.

1. **Pembahasan**
2. **Pengaruh Penanaman Modal Asing (X1) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)**

Dengan adanya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone. Investasi PMA berupa investasi asing langsung yang merupakan salah satu bentuk modal yang menarik karena tidak menciptakan utang tetapi justru menciptakan pekerjaan produktif yang akhirnya menciptakan lapangan kerja dan produksi. Oleh karena itu, bentuk investasi seperti ini lebih banyak digemari oleh daerah-daerah yang membutuhkan modal.

Dengan adanya investasi PMA mampu mendorong perusahaan lokal untuk menginvestasikan lebih banyak pada industri pendukung atau dengan bekerjasama dengan perusahaan asing. Kenyataannya, perusahaan asing mampu mendorong perusahaan lokal dengan cara membantu perkembangan perusahaan lokal dengan tenaga manusia, uang dan bahan serta memberikan latihan dan pengalaman kepada para personil.

Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS (tabel 4.17 halaman 116), koefisien variabel PMA menunjukkan nilai sebesar 238.311. Artinya, jika PMA ditingkatkan sebesar 1 persen, maka terjadi peningkatan PDRB sebesar 238.311 persen pada periode 2000-2010. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2000-2010 terjadi upaya Penanaman Modal Asing (PMA) yang berlaku untuk skala waktu yang cukup lama sehingga berdampak dalam peningkatan PDRB. Namun demikian, proses PMA berjalan tidak teratur sehingga terjadi fluktuasi nilai setiap tahunnya, sehingga faktor PMA kadang kecil dan kadang besar pengaruhnya. Walau demikian, secara keseluruhan PMA berpengaruh positif terhadap peningkatan PDRB di Kabupaten Bone. Artinya setiap penambahan PMA akan mengakibatkan penambahan terhadap PDRB di Kabupaten Bone.

Menurut Sukirno (2005:128) bahwa sebenarnya semakin banyak investasi swasta yang dilakukan baik asing maupun lokal yang dilakukan pada suatu daerah maka akan menyebabkan kenaikan pendapatan daerah itu (PDRB), namun dampak dari investasi tersebut kadang tidak langsung dirasakan untuk jangka pendek tapi nanti jangka panjang. Suatu investasi yang besar biasanya akan kembali modal atau pulang pokok setelah sepuluh sampai dua puluh tahun, sehingga investasi tersebut akan dirasakan dampaknya pada masa yang cukup lama.

1. **Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (X2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)**

Perkembangan PMDN berdasarkan tabel 4.8 pada halaman 101 memberikan gambaran investasi yang berfluktuasi. Perkembangan PMDN selama kurun waktu 2000-2010 di Kabupaten Bone mengalami tren yang negatif, dimana PMDN mengalami penurunan setelah implementasi otonomi daerah. PMDN merupakan bagian daripada investasi yang akan menambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan meluasnya investasi pada suatu daerah yang berarti akan mendorong kesempatan kerja serta memperbaiki kondisi perekonomian yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara PMDN dan PDRB sesuai dengan teori pada dasarnya menunjukkan hubungan antara PMDN dan PDRB yang positif. Menurut teori ekonomi pembangunan (Teori Harold-Domar) diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu Negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang dapat ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula.

Dari hasil pengolahan data melalui program SPSS (tabel 4.17 halaman 116), dilihat dari nilai koefisien variabel PMDN sebesar -56.577 persen, ini menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan 1 persen investasi PMDN maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 56.577 persen dan nilai koefisien variabelnya menunjukkan pengaruh PMDN yang kontradiktif berarti mempunyai hubungan yang negatif antara investasi PMDN dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Bone tahun 2000-2010. Hal ini dikarenakan investasi PMDN kebanyakan dalam bentuk investasi jangka panjang. Investasi PMDN dalam jangka panjang akan memberikan *multiplier effect* karena selain dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

PMDN dan PDRB di Kabupaten Bone berdasarkan hasil uji regresi tersebut di atas dan kenyataan yang ada menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dan memberikan pengaruh negatif terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan PMDN tidak menyebabkan peningkatan PDRB. Hubungan negatif antara PMDN dengan PDRB di Kabupaten Bone ditunjukkan dengan kenyataan bahwa PMDN akan mempengaruhi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama bagi para produsen-produsen dalam melanjutkan usahanya. Salah satu penyebab walaupun PMDN yang disetujui oleh pemerintah cukup tinggi, tapi ternyata tidak banyak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah investasi yang telah disetujui oleh pemerintah tidak segera dapat direalisasikan, umumnya realisasi investasi membutuhkan waktu rata-rata 5 tahun sejak persetujuan diperoleh dari KPPM.

Penanaman Modal Dalam Negeri dipengaruhi oleh fungsi dari pendapatan, apabila pendapatan meningkat maka akan menciptakan harapan keuntungan yang optimis dan pembiayaan investasi baru akan memberikan keuntungan yang besar. Dengan demikian meningkatnya tingkat pendapatan akan mengakibatkan peningkatan jumlah proyek investasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendapatan pada tahun sebelumnya.

Hubungan yang tidak signifikan dapat dijelaskan bahwa apabila PMDN turun maka pendapatan juga mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan PDRB menurun. Namun dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik, diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Sukirno (2005:130-131) perlu disadari bahwa tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Maksudnya dalam jangka panjang, apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi khususnya PMDN di Kabupaten Bone yakni, KPPM perlu mendorong pemerintah dalam memperbaiki sistem regulasi, selain itu mendesak pemerintah daerah dalam menerapkan Online Tracking System karena sistem ini bertujuan untuk mempermudah izin usaha atau investasi, serta melakukan penyederhanaan prosedur perizinan investasi. Pemerintah juga diharapkan melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur serta memberikan beberapa fasilitas pembebasan atau keringanan perpajakan guna peningkatan PMDN agar dapat memberikan kontribusi yang baik untuk Kabupaten Bone.

1. **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (X3) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)**

Pengeluaran pemerintah dalam teori Rostow. Hukum Wegner, teori Peacock dan Wiseman bertujuan untuk mendorong ekonomi daerah. Jika dihubungkan dengan PDRB maka pengeluaran pemerintah yang jika terealisasi dengan baik akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian termasuk dalam meningkatkan PDRB. Pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif akan mendorong dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan mendorong investasi. Adanya investasi mendorong industri dalam daerah yang pada akhirnya akan mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mampu menyeimbangkan dengan permintaan masyarakat yang juga berdampak pada keseimbangan harga.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan statistik program SPSS (tabel 4.17 halaman 116), maka koefisien variabel pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan nilai sebesar 3,517. Artinya, jika pengeluaran pemerintah daerah ditingkatkan sebesar 1 persen, maka terjadi peningkatan PDRB sebesar 3,517 persen pada periode tahun 2000-2010. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang positif terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Artinya setiap penambahan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan penambahan terhadap PDRB.

Pengeluaran pemerintah di Kabupaten Bone memberikan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan PMA karena sekitar 69,71% dari pengeluaran pemerintah dipergunakan sebagai biaya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan yang habis sekali pakai, sehingga tidak langsung memberikan kontribusi terhadap PDRB atau pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bone. Sedangkan biaya pengeluaran untuk pembangunan hanya sebesar 20,44% dari pengeluaran pemerintah. Hal ini mempengaruhi besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB, karena hanya 20,44% dari pengeluaran pemerintah yang langsung mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB serta mampu menunjukkan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bone. Sisanya 9,85% dipergunakan dalam biaya tidak terduga dan belanja bagi hasil.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi regional juga tidak dapat lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah, semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Pengeluaran pemerintah Kabupaten Bone pada dasarnya diharapkan dapat memajukan perekonomian dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Pengeluaran pemerintah yang teralokasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan PDRB di Kabupaten Bone.

Hasil analisis data pada tabel 4.18 menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Setiap penambahan pengeluaran oleh pemerintah meningkatkan PDRB. Hal ini memberikan bukti produktifnya belanja pemerintah Kabupaten Bone sehingga sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah PDRB.

Said (2009:55-57) menyatakan keberhasilan suatu pengelolaan keuangan daerah mencapai optimalisasi yang baik apabila pendapatan lebih besar dari belanja yang dikeluarkan. Suatu kemampuan bagi instansi pemerintah yang berhasil mengoptimalkan pengelolaannya yaitu kemampuan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan peruntukan suatu instansi dalam kegiatan belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga serta transfer.

Keberhasilan suatu pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengelola sumber-sumber dan jenis-jenis pembiayaan dengan manfaat dari biaya yang dikeluarkan akan memberikan efek terjadinya disalokasi pendanaan anggaran. Tetapi apabila pembiayaan dilakukan sesuai dengan tepat alokasi atau tepat sasaran, berdampak pada peningkatan tingkat penerimaan sumber pendapatan dari alokasi pembiayaan yang didanai. Pembiayaan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Keberadaan pembiayaan memainkan peranan penting untuk memperlancar dan memperbaiki suatu sistem tata kelola pendanaan anggaran dengan prospektif dan orientasi yang tepat sasaran.

1. **Pengaruh Penanaman Modal Asing (X1), Penanaman Modal Dalam Negeri (X2), dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (X3) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)**

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa melalui metode kuantitatif regresi linier berganda telah terbukti apabila variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengeluaran pemerintah daerah secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya, akan dibahas hasil analisis kuantitatif regresi linier berganda dengan menggunakan pendekatan teoritis, artinya hasil analisis kuantitatif digunakan sebagai petunjuk awal untuk menelusuri beberapa permasalahan dan fenomena. Pada akhirnya dengan mendayagunakan data yang tersedia dan dihubungkan dengan dasar teoritis serta hasil analisis kuantitatif, akan dapat diperoleh pemecahan yang lebih komprehensif dari permasalahan.

Signifikansi pengaruh PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB secara simultan dapat diketahui melalui nilai uji F, sedangkan besarnya proporsi variasi dari PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB secara simultan dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ganda (R2). Nilai Fhitung yang diperoleh melalui perhitungan SPSS pada tabel 4.17 halaman 116 menunjukkan nilai sebesar 18,137 sedangkan nilai sig. Fhitung menunjukkan nilai sebesar 0,001 pada taraf sigifikansi 5% atau 0,05. Artinya terbukti bila pengaruh PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah daerah secara simultan terhadap PDRB adalah signifikan. Besarnya nilai R2 adalah 0,886 artinya 88,6% variasi PMA, PMDN, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan dan sisanya 11,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Hasil penelitian ini berdasarkan teori menurut model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah, namun peranan investasi swasta (PMA dan PMDN) sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistik inferensial berdasarkan tabel 4.17 pada halaman 116 telah terbukti bahwa berdasarkan hipotesis yang telah diajukan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone tahun 2000-2010. Berpengaruh signifikan karena nilai t hitung pada variabel tingkat PMA terhadap PDRB di Kabupaten Bone adalah 1,959 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,90 dan taraf signifikan t PMA sebesar 0,031 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0,05 sehingga berdasarkan kriteria tersebut, PMA secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Bone dan nilai t hitung pada variabel pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Bone adalah 3,517 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,90 dan taraf signifikan t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0,05 sehingga berdasarkan kriteria tersebut, pengeluaran pemerintah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Bone.

Berpengaruh positif karena koefisien variabel (β) menunjukkan sebesar 238,311X1 pada PMA dan koefisien variabel (β) pada pengeluaran pemerintah menunjukkan sebesar 3,517 X3, keduanya menunjukkan nilai positif.

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone tahun 2000-2010. Berpengaruh tidak signifikan karena nilai thitung pada variabel tingkat PMDN terhadap PDRB di Kabupaten Bone adalah -0,755 yang lebih kecil dari ttabel yaitu 1.90 dan taraf signifikan t sebesar 0,475 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan (α) 0.05 sehingga berdasarkan kriteria tersebut, PMDN secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Bone. Berpengaruh negatif karena koefisien variabel (β) menunjukkan nilai sebesar -56,577X2 pada PMDN.

Dengan adanya PMA dan PMDN dalam bentuk perusahaan, maka akan menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja disamping dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB. Investasi mempunyai peran ganda dalam perekonomian suatu daerah, yaitu investasi menciptakan pendapatan dan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

1. **Variabel yang Dominan Mempengaruhi PDRB di Kabupaten Bone**

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi PMA yang dominan mempengaruhi PDRB di Kabupaten Bone periode tahun 2000-2010, karena nilai koefisien variabel investasi realisasi PMA lebih besar dibandingkan dengan koefisien variabel PMDN dan pengeluaran pemerintah daerah. Dari hasil perhitungan SPSS *for windows* berdasarkan pada tabel 4.17 menunjukkan hasil koefisien variabel PMA sebesar 238.311, sedangkan PMDN hanya sebesar -56.577 dan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 3.517. Hal ini menunjukkan bahwa PMA memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan PMDN dan pengeluaran pemerintah.

PMA mendominasi terhadap PDRB di Kabupaten Bone disebabkan karena dengan adanya PMA memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu daerah. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian daerah tempat modal itu ditanamkan serta bagi daerah asal para investor.

Investasi PMA mempunyai keuntungan lain yaitu masuknya *external economies* ke dalam perekonomian suatu bangsa. Di samping membawa modal asing dan *foreign exchange* masuk ke dalam perekonomian suatu bangsa, juga membawa masuk pengetahuan manajerial, ahli-ahli teknologi, ahli teknik, pengetahuan teknologi, pengetahuan berorganisasi, serta inovasi dalam produksi dan proses produksi, yang kesemuanya itu secara ekonomis merupakan barang langka dan terbatas. Keberadaan PMA ini tidak terlepas dari peranan perusahaan multinasional.

Keuntungan dari PMA untuk Negara berkembang dapat dihasilkan dari tingkat upah riil yang lebih besar untuk tenaga kerja domestik dan atau kesempatan kerja yang lebih luas, pilihan yang lebih banyak dari kualitas produk yang baik dengan tingkat harga yang lebih rendah untuk konsumen domestik, meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak terhadap investasi asing tersebut, dan keuntungan-keuntungan tidak langsung atau eksternalitas ekonomi dari peningkatan teknologi, pelatihan tenaga kerja lokal, dan mendorong perusahaan-perusahaan domestik melalui keterkaitan ke depan maupun ke belakang. Penanaman Modal Asing (PMA) juga dapat mengakibatkan kerugian atau biaya bagi Negara resipien/penerima, seperti: berbagai konsensus khusus yang diberikan kepada investor asing, misal pengurangan pajak, pengaruh negatif terhadap tabungan domestik, kesulitan-kesulitan neraca pembayaran dan campur tangan asing urusan dalam negeri Negara penerima.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Penanaman Modal Asing dan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, selanjutnya Penanaman Modal Dalam Negeri belum dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto karena banyaknya prosedur perizinan serta sulit dikeluarkannya perizinan usaha atau investasi serta sarana dan prasarana yang belum memadai di Kabupaten Bone.
3. Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Artinya, ketiga variabel ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB. Berarti setiap peningkatan PMA, PMDN dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan PDRB di Kabupaten Bone.
4. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa implikasi dari kebijakan yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan PDRB di Kabupaten Bone adalah:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bone melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.

133

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat menarik investasi asing dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dapat semakin meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.
2. PMDN belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Bone maka diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan volume investasi di Kabupaten Bone.
3. Belanja pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD sebaiknya lebih digunakan pada belanja pembangunan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arif Tiro, M. dan Baharuddin Ilyas. 2002. *Statistika Terapan.* Makassar: Andira Publisher

Arif Tiro, M. 2008. *Dasar-Dasar Statistika. Edisi Ketiga.* Makassar: Andira Publisher

Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima.* Yogyakarta: STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat II Kabupaten Bone 2010. *Bone dalam angka 2000-2010*

Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPEE UGM

Gujaratih, Damodar N. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1 dan 2*. Jakarta: PT. Erlangga.

Jhingan, M. L. 1995. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Kedua.* Jakarta: Rajawali Pers.

Mankiw, N. G. 2006. *Makroekonomi. Edisi keenam.* Jakarta: Erlangga

Mangkoesobroto. 2001. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga. Cetakan 10.* Yogyakarta: BPFE Yogya.

Nachrowi, D.N., dll. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri (Pendekatan popular dan praktis dilengkapi teknik analisis dan pengolahan data dengan menggunakan paket Program SPSS). Edisi Revisi.* Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Nicholson, W. 1998. *Mikroekonomi Intermedite dan Aplikasinya.* Jakarta: Erlangga.

Pratiwi, F. 2009. *Analisis Kausalitas Antara Kredit Investasi yang Disalurkan Bank Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.* Medan: Universitas Sumatera Utara.

Rahardja, P. dan Mandala M. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi), Edisi Revisi.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Riduwan. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis.* Bandung: Alfabeta.

Rustiono, D. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi. Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Said, A. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pusat.* Bandung: Tarsito

Santoso, S. 2007. *Soal-Jawab Statistik dengan SPSS dan EXCEL.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sitompul, N. L. 2007. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara.* Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sukirno, S. 2005. *Makro Ekonomi Modern. Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian baru.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

--------------. 2005. *Pengantar Teori Makro Ekonomi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suparman. 2003. *Sektor Swasta dan Sektor Pemerintah.* Jakarta: PT. Nusa Bakti.

Suneki, S. 2006. *Determinan Perilaku Investasi Swasta di Provinsi Jawa Tengah.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Suryana. 2008. *Ekonomi Pembangunan.* Bandung: Salemba Empat.

Syaputra, S. 2004. *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan.* Medan: Universitas Sumatera Utara.

Taringan, R. 2009. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. Cetakan Kelima.* Jakarta: Bumi Aksara

Torado, M. P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan.* Jakarta: Erlangga.

Wibisono, Y. 2005. *Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional. Studi Empiris Antar Provinsi di Indonesia. 1984-2000. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol. 02.* Universitas Gajah.

Widodo, T. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.theceli.com/dokumen/produk/1967/1-1967.htm